

**KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN  
BARACK OBAMA TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh :**

**BELLA KUSUMA AGUSTINA**

**14323088**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN  
BARACK OBAMA TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

**BELLA KUSUMA AGUSTINA**

**14323088**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN  
BARACK OBAMA TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

14 FEB 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S.

Dewan Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
2. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
3. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

Karina  
Gustrieni  
Enggar

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Bella Kusuma Agustina  
No. Mahasiswa : 14323088  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Kebijakan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Barack Obama Terkait Program Nuklir Iran

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 Februari 2019

Yang menyatakan,



Bella Kusuma Agustina

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

### **Papa dan Mama**

Terimakasih atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, perhatian, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga selama ini.

### **Adik**

Terimakasih atas semua doa, dukungan, kasih sayang dan nasehat.

### **Semua Keluarga Besar**

Terimakasih atas doa, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

## **HALAMAN MOTTO**

“Tetap Setia Pada Proses”

**Ali Antoni**

## PRAKATA



Segala puji dan syukur kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* atas segala rahmat-Nya serta segala kekuatan dan kemudahan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Kemudian, Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, motivasi, diskusi, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Terimakasih Ibu Karina telah menginspirasi saya selama ini. Kemudian, saya mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan yang lebih mulia.
4. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.

5. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Terimakasih atas kemudahan dalam mengurus administrasi.
6. Kedua orang tua, adik serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kasih sayang selama ini.
7. Ali Antoni, Terimakasih selalu memberi dukungan, bantuan, dan waktu untuk diskusi serta ilmu yang bermanfaat.
8. Samgar Mesyareto Abdiel, Terimakasih selalu memberi dukungan, bantuan, semangat dan kasih sayangnya.
9. Ungki Nolla, sahabat yang selalu memberi dukungan, semangat dan waktu untuk diskusi. Terimakasih.
10. Sahabat-sahabatku Eva, Laella, Giza, Riane, Ifti dan Novi, Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bantuan dan waktu yang telah kalian luangkan.
11. Novrizal Roynanda, Terimakasih telah memberikan ide, bantuan dan diskusi yang bermanfaat.
12. Teman-teman prodi Hubungan Internasional 2014 dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih.



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR GRAFIK DAN TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	4
1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN.....	4
1.5. CAKUPAN PENELITIAN.....	6
1.6. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
1.6.1 Program Nuklir Iran.....	7
1.6.2 Kebijakan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama .....	9
1.7. LANDASAN KONSEPTUAL .....	11
1.8. METODE PENELITIAN.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek Penelitian.....	15
1.8.3 Alat Pengumpul Data .....	15
1.8.4 Proses Penelitian .....	16
<b>BAB II ANALISIS <i>GOALS AND OBJECTIVES</i> DAN <i>ALTERNATIVES</i></b> <b>AMERIKA SERIKAT TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN</b> .....	17
2.1 <i>GOALS AND OBJECTIVES</i> .....	18
2.1.1 <i>Goals and Objectives</i> Amerika Serikat.....	19

2.1.2	Faktor Yang Mempengaruhi <i>Goals and Objectives</i> AS.....	19
2.2	<i>ALTERNATIVES</i> .....	22
2.2.1	Sanksi Ekonomi .....	23
2.2.2	Langkah Militer.....	26
2.2.3	Kesepakatan <i>Joint Comprehensive Plan Of Action</i> (JCPOA).....	27
<b>BAB III ANALISIS <i>CONSEQUENCES</i> DAN <i>CHOICE</i> AMERIKA SERIKAT TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN</b> .....		34
3.1	<i>CONSEQUENCES</i> .....	34
3.1.1	Konsekuensi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat .....	36
3.1.2	Konsekuensi Langkah Militer .....	37
3.1.3	Konsekuensi <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA) .....	39
3.2	<i>CHOICE</i> .....	48
3.3.	JCPOA Sebagai <i>Rational Choice</i> Presiden Barack Obama .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....		53
4.1	KESIMPULAN .....	53
4.2	REKOMENDASI.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		57

## DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

### Grafik

Grafik 1. Ekspor Minyak Mentah dan Kondensat Iran.....	25
--	----

### Tabel

Tabel 1. <i>Costs</i> dan <i>Benefits</i> Kebijakan Alternatif Amerika Serikat.....	35
Tabel 2. JCPOA Sebagai <i>Rational Choice</i> Presiden Barack Obama.....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> <i>Preface Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)</i>
---

## DAFTAR SINGKATAN

JCPOA	: Joint Comprehensive Plan of Action
WMD	: Weapon of Mass Destruction
NPT	: Nuclear non-Proliferation Treaty
IAEA	: International Atomic Energy Agency
UN	: United Nations
UNSC	: United Nations Security Council
EU	: European Union
LEU	: Low Enriched Uranium
TRR	: Tehran Research Reactor

## **ABSTRAK**

Sejak adanya isu program nuklir Iran terjadi ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Hal itu dikarenakan pelanggaran NPT oleh Iran yang menimbulkan pertanyaan besar dalam dunia internasional, apakah Iran akan mengembangkan program nuklirnya sebagai sumber daya atau senjata pemusnah massal. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakstabilan keamanan di wilayah Timur Tengah yang juga berdampak pada kepentingan Amerika Serikat di wilayah itu. Jika wilayah Timur Tengah tidak stabil maka kepentingan Amerika Serikat cenderung akan terhambat, contohnya seperti melindungi keamanan negara mitra Amerika Serikat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat berupaya untuk menghentikan proliferasi nuklir Iran. Upaya proliferasi ini pada masa George W. Bush cenderung menggunakan kebijakan-kebijakan yang agresif terhadap Iran. Hal itu berbeda dengan masa pemerintahan Barack Obama yang tegas tetapi juga menggunakan langkah yang diplomatis. Pada masa pemerintahan Barack Obama ini, Amerika Serikat mengambil langkah yang belum pernah dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Langkah tersebut yaitu kerja sama dengan Iran terkait program nuklirnya melalui JCPOA. Dalam JCPOA, Iran bersepakat dengan negara-negara P5+1 agar program nuklirnya berjalan dengan damai. Hal yang menarik untuk diteliti dalam isu program nuklir Iran adalah proses pengambilan kebijakan Barack Obama tersebut.

Kata Kunci : Program Nuklir Iran, Barack Obama, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, JCPOA

## **ABSTRACT**

The tension between US and Iran relations had increased since Iranian nuclear crisis. The tension increased because Iran had violated the NPT and it made a question among international community whether Iran would develop its nuclear program for peace purpose or for developing weapon of mass destruction. This condition has allowed an unstable security situation in the Middle East. The instability affected US interests in Middle East. If the Middle East is not stable, there will be a tendency that the US interest will be stumbled, such as the US interests to protect its allies in Middle East. Therefore, the US is determined to prevent Iranian nuclear proliferation. In George W. Bush's era to prevent Iranian nuclear proliferation, the US foreign policy tends to use policies that is aggressive toward Iran. In the other hand, in Obama's era, US foreign policy was firm and also diplomatic toward Iran. In Obama's era, the US seek a way that has never been taken before by his predecessors. Barack Obama, through his foreign policy, made a solution to prevent Iran's nuclear proliferation. The solution was JCPOA. In JCPOA, Iran was willing to cooperate with US, United Kingdom, Russia, China, France and Germany or as we called as P5+1 states. So that Iran's nuclear program could progress in peace. The interesting part to research in this issue is the process of making Barack Obama's foreign policy.

Keywords : Iran's Nuclear Program, US Foreign Policy, Barack Obama, JCPOA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pada era globalisasi saat ini, nuklir merupakan energi yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya dan juga senjata militer seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju. Negara-negara maju memiliki nuklir dengan tujuan agar negara dapat merasa aman dalam bidang keamanannya dan negara yang mendominasi dalam kepemilikan senjata nuklir salah satunya adalah Amerika Serikat. Di samping memberikan keamanan pada negara, kepemilikan nuklir oleh negara lainnya dapat memberikan rasa tidak aman bagi negara tersebut (Viney, 2015). Berkaitan dengan isu mengenai nuklir, salah satu agenda Amerika Serikat adalah menghentikan program proliferasi nuklir milik Iran.

Pada awalnya program nuklir oleh Iran ini dimulai pada masa kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlevi dengan bantuan dari Amerika Serikat. Kemudian Iran juga menyetujui untuk mengikuti *Nuclear non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1968 dan mulai diratifikasi pada tahun 1970, dimana NPT adalah perjanjian untuk menggunakan energi nuklir dengan tujuan yang damai dan tidak memproduksi senjata nuklir. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan Iran dan Amerika Serikat dapat dikatakan stabil (Özdamar, 2009, hal. 121-124). Pada tahun 1979, kerja sama nuklir Amerika Serikat dan Iran berhenti sementara waktu sejak adanya revolusi Iran. Akan tetapi pada tahun 1980-an, Iran memulai kembali program nuklirnya dengan kerja sama dari Pakistan, Tiongkok dan Russia. Dengan adanya kerja sama itu, Iran

mengumumkan bahwa program nuklir tersebut bertujuan damai dan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi pihak Amerika Serikat beranggapan bahwa program nuklir tersebut sebenarnya merupakan program pengembangan senjata nuklir (Sterio, 2016, hal. 70-71).

Hubungan Amerika Serikat dan Iran menjadi kurang harmonis pada saat kelompok oposisi Iran memberikan pernyataan bahwa Iran menyembunyikan program pengayaan uranium di Natanz yang didukung oleh bukti dari dokumentasi satelit. Dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah Iran kemudian memberikan tanggapan bahwa program nuklir ini memiliki tujuan yang damai dan mengizinkan pihak *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan inspeksi. Meskipun begitu, Amerika Serikat tetap menduga bahwa program nuklir Iran digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir dan hal itu juga menyebabkan munculnya rasa tidak aman pada Amerika Serikat terhadap Iran, karena menurut Amerika Serikat di sini terdapat 'usaha' Iran untuk mengembangkan senjata nuklir (Özdamar, 2009, hal. 121-124).

Pada tahun 2003 Iran sempat menghentikan pengayaan uraniumnya agar hubungannya dengan Amerika Serikat dapat membaik, akan tetapi usaha ini tidak ditanggapi dengan baik oleh Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat beranggapan bahwa dalam dunia politik Iran sejak adanya peristiwa Revolusi Islam terdapat idealisme yang membentuk sentimen anti-western, dimana Amerika Serikat dan EU dianggap hanya ingin mendominasi Iran. Sehingga mereka beranggapan bahwa program nuklir tersebut berguna sebagai 'penghalang' dari neo-kolonialisme negara-negara barat. Oleh karena itu,

Amerika Serikat merasa ‘sulit’ untuk mengambil sikap yang kooperatif terkait isu program nuklir Iran ini (McGlinchey, 2012).

Dengan adanya isu mengenai program nuklir Iran tersebut, Amerika Serikat sebagai negara yang mendominasi nuklir merasa tidak aman karena Iran melakukan program proliferasi nuklir. Sehingga Presiden Bush berasumsi bahwa Iran mengembangkan nuklir sebagai senjata penghancur. Terkait dengan program nuklir Iran itu, Presiden George W. Bush cenderung menggunakan kebijakan yang agresif untuk menangani kasus ini. Kebijakan Presiden George W. Bush terhadap Iran salah satunya adalah meneruskan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat untuk menekan Iran agar dapat menghentikan program nuklirnya (Wright, 2008).

Kebijakan George W. Bush yang cenderung agresif dan memberikan tekanan itu, berbeda dengan kebijakan Barack Obama yang cenderung mengajak kerja sama. Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat membuat kebijakan yaitu kebijakan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* dengan kerja sama antara Iran dan Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis, Inggris juga Jerman. Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan bahwa program nuklir Iran tetap berjalan aman dan sesuai dengan aturan (State, 2015). Di samping itu, Presiden Barack Obama juga membebaskan Iran dari sanksi ekonomi yang telah diberikan Amerika Serikat untuk menekan Iran. Dengan pembebasan sanksi ekonomi tersebut hubungan Amerika Serikat dan Iran mulai membaik (Morello, 2016).

Strategi yang digunakan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama tersebut menarik untuk dilihat mulai pada perbedaan strategi George W. Bush yang cenderung agresif dan memberikan tekanan pada Iran, yang kemudian dapat



berubah menjadi kerja sama antara Amerika Serikat dan Iran dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama. Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama itulah yang menarik untuk dikaji.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama terkait program nuklir Iran?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong Amerika Serikat dalam kebijakannya terkait program nuklir Iran pada masa pemerintahan Barack Obama dengan menggunakan pendekatan model pengambilan kebijakan dari Graham T. Allison untuk suatu negara. Lalu, dampak apa saja yang berpengaruh terhadap hubungan Iran dan Amerika Serikat setelah kebijakan-kebijakan pada masa kepemimpinan Presiden Amerika Serikat tersebut diterapkan dan juga hal-hal atau pertimbangan apa saja yang melatar belakangi pengambilan kebijakan Amerika Serikat terkait program nuklir Iran tersebut.

## **1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah merupakan hal yang selalu menarik untuk dikaji, salah satunya yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait dengan adanya isu program nuklir Iran. Kebijakan Amerika Serikat mengenai program nuklir Iran yang menarik untuk dilihat salah satunya adalah perubahan dari masa pemerintahan Presiden George W. Bush ke

pemerintahan Presiden Barack Obama yang mana kebijakan Bush pada masa pemerintahannya fokus terhadap 4 hal yaitu, 1) Keamanan Israel dan negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, 2) Keamanan energi, 3) Mencegah adanya terorisme dan 4) Mencegah perluasan proliferasi nuklir hingga ke seluruh wilayah regional Timur Tengah (Simpson, 2016). Di samping itu, Amerika Serikat juga mendapatkan dukungan melalui *Security Council* pada *United Nations* (UN) dengan mengeluarkan resolusi 1696 pada tahun 2006 yang pada intinya agar Iran menghentikan pengayaan uraniumnya dan jika Iran tidak menghentikan pengayaan uraniumnya maka Iran akan menerima sanksi ekonomi ataupun sanksi diplomatik (Council, 2006). Fokus kebijakan Barack Obama juga masih sama seperti pada masa Bush yang dalam kasus ini adalah mencegah perluasan proliferasi nuklir dan sebagian kebijakan yang telah dilakukan pada masa Presiden George W. Bush tersebut juga masih diteruskan pada masa Pemerintahan Barack Obama, seperti pemberian sanksi ekonomi melalui UN pada tahun 2010 yaitu menggunakan resolusi UN 1929 (Thompson, 2011, pp. 7-8).

Hal yang menarik untuk dilihat dalam kasus ini adalah bagaimana Presiden Barack Obama mengambil kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan Amerika Serikat agar dapat ‘mengontrol’ program nuklir Iran yang pada masa pemerintahan George W. Bush dapat dikatakan belum bisa dicapai. Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama meskipun juga mengambil langkah yang tegas, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran mengalami perubahan yaitu Amerika Serikat memulai kembali hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam diplomasinya Presiden Barack Obama juga bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Rusia, Tiongkok, Perancis, Inggris dan Jerman

agar Iran mengurangi pengayaan uraniumnya melalui kesepakatan JCPOA (Baidya, 2010, hal. 179-180).

Kebijakan Presiden Barack Obama tersebut tentu memiliki tantangan dan manfaat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, signifikansi dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama itu dalam mengatasi isu program proliferasi nuklir Iran dilihat dari konsekuensi dan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga dapat menghasilkan kesepakatan JCPOA dengan Iran. Selain itu, pada tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana dalam mencapai kesepakatan JCPOA terdapat proses *Rational Choice* sehingga Amerika Serikat memutuskan untuk mengambil langkah JCPOA tersebut dengan Iran dan negara-negara lain yang terkait.

## **1.5. CAKUPAN PENELITIAN**

Skripsi ini fokus pada proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Husein Obama terkait dengan program nuklir Iran. Hal yang mendasari penulis untuk mengambil analisis proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama karena kebijakan yang diambil Presiden tersebut dalam beberapa hal terlihat bertolak belakang dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Akan tetapi, cara tersebut masih belum memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk membuat Iran ‘mengikuti’ kepentingan Amerika Serikat pada periode pertama pemerintahan Obama (Kryzanek, 2011).

Kemudian pada masa pemerintahan selanjutnya, Presiden Barack Obama memberikan beberapa perubahan pada arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi lebih diplomatis juga tegas melalui kebijakan yang memberikan hasil berupa kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang pada akhirnya disepakati oleh Iran sehingga Iran dapat ‘mengikuti’ kepentingan Amerika Serikat yang menginginkan agar Iran menurunkan presentase pengayaan uraniumnya (Entessar, 2018). Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama terhadap program nuklir Iran hingga menghasilkan kesepakatan JCPOA jika ditinjau dengan model *Action as Rational Choice* milik Allison.

## **1.6. TINJAUAN PUSTAKA**

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama terkait program nuklir Iran. Kemudian penulis akan mengambil beberapa literatur sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

### **1.6.1 Program Nuklir Iran**

Iran melaksanakan program nuklirnya sejak pertengahan tahun 1960-an dengan bantuan dari Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga menandatangani perjanjian *Non-Proliferation of Nuclear weapons* (NPT). Dengan perjanjian nuklir tersebut, Iran diperbolehkan untuk melakukan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan yang damai dibawah pengawasan dari *International Atomic Energy*

*Agency* (IAEA). Hingga pada tahun 2003, Iran yang sebelumnya dikatakan mengembangkan senjata nuklir oleh pihak oposisinya mengatakan bahwa pengembangan nuklir tersebut hanya untuk tujuan damai. Meskipun begitu, pihak Amerika Serikat pada saat itu tidak percaya akan hal tersebut dan menginginkan adanya inspeksi lebih lanjut mengenai hal tersebut (Izadi, 2007, hal. 145). Dalam jurnalnya yang berjudul *A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorials : The Case of Iran's Nuclear Program* milik Foad Izadi lebih menjelaskan bahwa media memiliki peran politik yang cukup penting dalam mempengaruhi pembuat kebijakan seperti contoh adanya gambaran dari para orientalis terhadap negara-negara muslim dan isu-isu politik mereka yaitu Islam adalah sumber ancaman. Hal itu berkaitan dengan isu program nuklir Iran yang lebih condong pada krisis kepercayaan Amerika Serikat terhadap Iran karena Amerika Serikat menganggap Iran adalah ancaman (Izadi, 2007, hal. 161-162). Media menjadi peran yang cukup penting seperti yang dikatakan oleh Izadi, dalam hal itu media dapat digunakan sebagai salah satu alat politik untuk menggiring opini publik agar publik setuju dengan kebijakan yang diambil oleh negara dan menciptakan citra suatu negara menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk.

Program nuklir Iran pada dasarnya merupakan suatu isu mengenai *power* Iran dengan pemerintahan di seluruh kawasan Timur Tengah, tanpa mengesampingkan masalah tentang aturan dari perjanjian NPT (*Non-Proliferation of Nuclear weapons*) yang diangkat oleh Amerika Serikat. Dalam hal itu, kepemilikan nuklir oleh Iran dapat menguntungkan bagi Iran agar Iran dapat menghalau pengaruh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya di kawasan Timur Tengah. Ambisi Iran dalam program nuklirnya dan kronologi nuklir Iran

sejak tahun 2002 hingga 2006 tersebut dijelaskan oleh Shahram Chubin pada bukunya yaitu *Iran's Nuclear Ambitions* (Chubin, 2006). Salah satu ambisi Iran yang disebutkan diatas merupakan ambisi yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, oleh karena itu Amerika Serikat bertujuan untuk mengawasi program nuklir Iran agar program nuklir tersebut tetap 'aman' dan terkendali.

### **1.6.2 Kebijakan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama**

Isu mengenai program nuklir Iran yang masih belum tuntas pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush memberikan tantangan bagi Presiden Obama yang menjabat selanjutnya. Terkait dengan isu tersebut, menurut buku *Containing Iran: Obama's Policy of "Tough Diplomacy"* yang ditulis oleh Sasan Fayazmanesh, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan periode pertama Presiden Obama memberikan sanksi untuk lebih menekan Iran atau dalam buku ini disebut dengan istilah *Tough Diplomacy* yang salah satunya melalui *the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act* (CISADA). Dalam buku ini juga dibahas mengenai berbagai sanksi yang telah memberatkan perekonomian Iran dengan tujuan agar perekonomian Iran runtuh sehingga Iran dapat mengikuti prosedur sesuai keinginan Amerika Serikat terkait program nuklirnya. Meskipun begitu, setelah periode pertama Presiden Obama berakhir, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perekonomian Iran akan runtuh (Fayazmanesh, 2013).

Pada masa pemerintahan Obama periode kedua dengan kebijakan selanjutnya terhadap program nuklir Iran, Amerika Serikat berhasil membuat

suatu kesepakatan yaitu *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan dari literatur yang ditemukan terdapat beberapa penulis yang telah menulis mengenai kebijakan JCPOA tersebut, misalnya jurnal yang ditulis oleh Milena Sterio dalam *Case Western Reserve Journal of International Law* berjudul “*President Obama’s Legacy : The Iran Nuclear Agreement*” yang lebih fokus menjelaskan tentang kesepakatan JCPOA itu sendiri, dimulai dari pembebasan sanksi terhadap Iran, struktur kesepakatannya, dan juga keuntungan dan kerugian dari kesepakatan tersebut. Berdasarkan perjanjian JCPOA tersebut, Iran menyetujui untuk mengurangi produksi uraniumnya hingga 98% selama 15 tahun. Menurut Milena Sterio, perjanjian tersebut menguntungkan bagi Iran untuk memperbaiki ekonomi maupun citra dirinya di dunia internasional. Disisi lain, Amerika Serikat juga merasa diuntungkan karena tujuannya untuk mengurangi pengayaan uranium Iran dan adanya pengawasan yang lebih ketat dari IAEA terhadap Iran dapat terlaksana (Sterio, 2016, hal. 70-71).

Pada buku “*The Obama Administration’s Nuclear Weapon Strategy : The Promises of Prague*” yang ditulis oleh Aiden Warren menjelaskan tentang pemerintahan Obama dalam menanggulangi isu - isu terkait nuklir. Pada bagian program nuklir Iran, Aiden Warren hanya fokus pada tahun 2008 – 2012 saja. Pemerintahan Obama pada saat itu, menerapkan kebijakan *dual-track diplomacy* yang mana pada *track* pertama Presiden Obama menggunakan cara yang diplomatis antara Amerika Serikat, Iran dan negara-negara P5+1 agar dapat tercapai kesepakatan terkait program nuklir Iran. Tetapi di sisi lain pada *track* kedua, Presiden Obama memberikan tekanan pada Iran dengan berbagai sanksi ekonomi dan tekanan diplomasi, salah satunya yaitu melalui implementasi dari

Resolusi UN 1929 pada tanggal 9 Juni 2010. Meskipun begitu menurut Aiden Warren, program nuklir Iran tetap terus berlangsung walaupun perekonomian Iran terkena dampak yang besar akibat tekanan dari pihak Amerika Serikat dan negara-negara P5+1 (Warren, 2014).

Meskipun tulisan-tulisan diatas membahas mengenai isu program nuklir Iran pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, fokus dalam penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat isu program nuklir Iran pada masa Presiden Barack Obama menggunakan landasan teori milik Graham T. Allison khususnya pada model *rational choice*. Fokus pada konsep *Rational Choice* tersebut yang akan membedakan penelitian ini dari penelitian lainnya, dimana konsep *Rational Choice* akan digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan kebijakan Presiden Barack Obama selama dua periode pemerintahannya jika dilihat dari hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan pertimbangan tantangan dan manfaat apa saja yang dihadapi pada saat pengambilan kebijakan.

### **1.7. LANDASAN KONSEPTUAL**

Landasan teori atau konsep yang digunakan untuk skripsi ini adalah model pengambilan kebijakan yang dijabarkan oleh Graham T. Allison dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dalam teori Allison dijelaskan 3 model pengambilan kebijakan, yaitu *Rational Choice*, *Bureaucratic Politics*, dan *Organizational Process*. Ketiga model pengambilan kebijakan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :



### **1. *Bureaucratic Politics***

Model yang kedua adalah *Bureaucratic Politics*, pada model ini kebijakan luar negeri ditentukan dengan adanya proses interaksi dari berbagai aktor yang terlibat dalam suatu isu. Sehingga dalam proses pengambilan kebijakan ini akan ada proses tawar menawar kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat dalam suatu isu (Allison, 1971, hal. 39-40).

### **2. *Organizational Process***

Model yang ketiga yaitu *Organizational Process*, pada model ini untuk menentukan kebijakan negara dilihat dari *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ada. Sehingga pengambilan kebijakan dilakukan dengan melihat dari apa yang berlaku sebelumnya atau dengan kata lain sesuai dengan aturan yang berlaku (Allison, 1971, hal. 78-79).

### **3. *Rational Choice***

Dalam model yang dijelaskan oleh Allison, *Action as Rational Choice* adalah model yang melihat perilaku aktor yang memiliki tujuan pada saat menanggapi suatu isu internasional dengan menggunakan alternatif kebijakan yang tersedia sehingga menghasilkan pilihan terbaik untuk memaksimalkan upaya dalam mencapai tujuannya. Pada model ini terdapat 4 tahap asumsi dasar menurut Allison, yaitu *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences* dan *Choice*. (Allison, 1971, hal. 29).

#### **a. *Goals and Objectives***

Dalam tahap *Goals and Objectives*, pembuat kebijakan mendeskripsikannya untuk mengukur skala dari setiap konsekuensi-konsekuensi dan kegunaan yang diambil dari setiap keputusan atau tujuan oleh seorang agen

atau pembuat kebijakan. Dapat dikatakan bahwa pembuat kebijakan dalam menentukan tujuannya mempertimbangkan beberapa hal, seperti segi keuntungan, kegunaan atau preferensi. Dari pilihan skala tujuannya tersebut maka pembuat kebijakan dapat memetakan apa saja kemungkinan yang akan terjadi jika mengambil tujuan itu (Allison, 1971, hal. 29).

*b. Alternatives*

Pada tahap yang kedua yaitu *Alternatives*, para pembuat kebijakan memilih diantara keseluruhan kebijakan alternatif yang ada pada suatu kondisi tertentu. Dalam model pengambilan kebijakan ini dari kebijakan alternatif-alternatif tersebut pembuat keputusan memilih alternatif yang memiliki spesifikasi tindakan yang cukup tepat untuk membedakannya dari alternatif yang lainnya sehingga lebih mendekati tujuannya. Kebijakan alternatif ini dalam *decision making* digambarkan melalui skema pohon keputusan/*decision tree* (Allison, 1971, hal. 29-30).

*c. Consequences*

Tahap yang ketiga adalah *Consequences*, dalam tahap ini kebijakan alternatif memiliki perkiraan hambatan dan manfaatnya masing-masing. Berbagai asumsi yang berbeda akan dihasilkan pada tahap ini tentang keakuratan pengetahuan pembuat kebijakan terkait konsekuensi dari pilihan kebijakan (Allison, 1971, hal. 30). Pembuat kebijakan menentukan konsekuensi yang relevan dari *benefits* dan *costs* sesuai dengan tujuannya dalam suatu kasus (Allison, 1971, hal. 33).

*d. Choice*

Tahap terakhir dari model *Rational Choice* ini adalah memilih salah satu dari pilihan kebijakan yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan negara terhadap suatu isu. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus melakukan analisa terhadap konsekuensi ataupun hasil yang didukung dengan prediksi akurat sehingga kebijakan ini dapat menjadi kebijakan yang terbaik bagi negara tersebut (Allison, 1971, hal. 30).

Pada proses untuk menganalisis kebijakan Pemerintahan Barack Obama terkait program nuklir Iran ini model yang akan digunakan, yaitu *Rational Choice*. Model *Rational Choice* ini dipilih karena model pengambilan kebijakan ini dinilai sesuai untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini dibandingkan dengan kedua model lainnya. Hal itu dikarenakan pada model *Bureaucratic Politics* cenderung melihat pengambilan kebijakan dengan adanya proses interaksi dan tawar-menawar kepentingan antar aktor. Model tersebut kurang sesuai karena skripsi ini lebih fokus pada proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat saja.

Kemudian, model yang ketiga yaitu *Organizational Process* juga kurang sesuai untuk diterapkan pada skripsi ini karena model ini lebih melihat pengambilan kebijakan berdasarkan SOP. Sedangkan, dalam skripsi ini bukan melihat pengambilan kebijakan sesuai SOP, melainkan lebih fokus pada bagaimana Amerika Serikat pada masa Obama menentukan kebijakan dengan memilih kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi Amerika Serikat dilihat dari manfaat dan tantangan dari kebijakan tersebut. Dengan pertimbangan tersebut maka dalam model pengambilan kebijakan *Rational Choice* merupakan model

yang paling tepat untuk melihat bagaimana kesepakatan JCPOA menjadi salah satu capaian pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama terbentuk.

## **1.8. METODE PENELITIAN**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana dalam mengumpulkan data-data yang terkait pada studi kasus dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan penjabarannya bersifat deskriptif (Sugiarto, 2015). Permasalahan pada penelitian ini akan digambarkan melalui pembagian subtopik agar dapat lebih jelas dalam menganalisis masalah. Kemudian analisa yang akan dilakukan menggunakan perbandingan data yang telah didapat dari data penelusuran pustaka yang akan membuat data menjadi lebih kredibel.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian ini adalah Amerika Serikat yang mana penulis ingin melakukan analisa terhadap bagaimana proses pengambilan kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama terkait program nuklir Iran jika dilihat dengan model pengambilan kebijakan *Rational Choice*.

### **1.8.3 Alat Pengumpul Data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi yang kredibel (Wibowo, 2011).

#### **1.8.4 Proses Penelitian**

Pada tahap analisis data ini akan dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut menjadi beberapa subtopik. Permasalahan akan digambarkan melalui pembagian subtopik agar dalam menganalisis masalah dapat lebih jelas. Dalam subtopik tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai subtopik tersebut. Lalu, dalam setiap tulisan pada subtopik tersebut akan dilakukan analisa melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian ini.

## BAB II

### ANALISIS *GOALS AND OBJECTIVES* DAN *ALTERNATIVES* AMERIKA SERIKAT TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN

Program nuklir Iran masih menjadi salah satu isu penting bagi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama yang mana pada masa pemerintahan sebelumnya isu ini belum dapat terselesaikan karena belum adanya hal-hal yang dapat mendorong Iran untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Isu program nuklir Iran sebelumnya menjadi kekhawatiran bagi Amerika Serikat sebagai polisi dunia karena Iran tidak mematuhi NPT dan cenderung tertutup mengenai program nuklirnya. Adapun hal-hal yang tidak dipatuhi oleh Iran terkait NPT adalah Iran tidak melaporkan pembelian uranium dari Tiongkok, Iran tidak memberikan informasi pada IAEA terkait proses konversi uranium dan pengayaan uranium, Iran juga tidak melaporkan situs pengayaan uranium pada IAEA dan Iran tidak melaporkan eksperimennya terhadap plutonium (Albright, 2006).

Di samping itu, Iran juga sulit bekerja sama dengan IAEA dan UN terkait akses pada program nuklirnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan serius bagi negara-negara lainnya terhadap tujuan dari proliferasi nuklir Iran. Amerika Serikat melihat masalah ini sebagai salah satu penyebab instabilitas dan ancaman keamanan di Timur Tengah (El-Khawas, 2011, hal. 93).

Isu program nuklir Iran tersebut akan dianalisis melalui model *Action as Rational Choice*. Menurut Graham T. Allison, *Rational Choice* adalah model pengambilan kebijakan yang melihat bagaimana aktor negara dapat memilih sebuah kebijakan paling efektif atau memaksimalkan keputusan tersebut untuk

dapat mencapai tujuannya (Allison, 1971, hal. 31). Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan menganalisis isu program nuklir Iran melalui model pengambilan kebijakan *Rational Choice* oleh Graham T. Allison. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Rational Choice* memiliki 4 tahap, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai 2 tahap pertama dari *Rational Choice*, yaitu sub-bab pertama akan menjelaskan tahap *goals and objectives* Amerika Serikat. Kemudian yang sub-bab kedua akan menjelaskan mengenai tahap *Alternatives*.

## **2.1 GOALS AND OBJECTIVES**

Pada masa pemerintahan Iran yang dipimpin oleh Ahmadinejad, Iran menjadi lebih agresif dalam proses pengembangan program nuklirnya. Sebagai contohnya adalah pada saat *American Intelligence Community* (AIC) menemukan fasilitas nuklir di Qom yang tidak dilaporkan oleh Presiden Ahmadinejad. Selain itu juga Iran cenderung tertutup pada IAEA tentang kelangsungan proses program nuklirnya (Menon, 2013, hal. 3-5). Mengetahui hal itu, Presiden Barack Obama dalam menjalankan kebijakan luar negerinya memiliki beberapa fokus penting, salah satunya yaitu mengurangi ketidakamanan dunia dari senjata nuklir. Kepentingan Barack Obama dalam mengurangi ketidakamanan dunia karena senjata nuklir inilah yang membuat Iran dan nuklirnya menjadi fokus dari Presiden Amerika Serikat tersebut (Indyk, 2012, hal. 6).

Mengacu pada *Rational Choice* oleh Allison, dalam *Goals and Objectives* pembuat kebijakan pertama-tama menentukan tujuan negara dalam suatu isu. (Allison, 1971, hal. 29). Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan tentang *goals and objectives* Amerika Serikat dalam program nuklir Iran pada sub-bab berikut.

### **2.1.1 *Goals and Objectives* Amerika Serikat**

Sesuai dengan model pengambilan kebijakan Graham T. Allison itu, *goals and objectives* Amerika Serikat pada isu program nuklir Iran yaitu menghentikan Iran yang dicurigai oleh pihak internasional untuk membangun *Weapon of Mass Destruction* (WMD). Hal itu dilakukan agar keamanan di wilayah Timur Tengah menjadi lebih stabil dan mempermudah Amerika Serikat untuk menjalankan kepentingannya di wilayah tersebut (El-Khawas, 2011, hal. 93-94).

Terkait hal tersebut menurut Barack Obama, jika Iran memiliki senjata nuklir maka tidak hanya menjadi ancaman keamanan bagi wilayah Timur Tengah saja, akan tetapi juga menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat karena salah satu fokus kepentingan Amerika Serikat pada masa Obama adalah mengurangi adanya ancaman keamanan dari senjata nuklir. Selain itu, jika Timur Tengah tidak stabil keamanannya maka hal ini akan berdampak pada kepentingan Amerika Serikat yang lainnya di wilayah itu (Pavgi, 2011).

Selanjutnya, pada tahap *goals and objectives*, dalam menentukan tujuannya pembuat kebijakan mempunyai beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan tujuannya dilihat dari beberapa faktor seperti keuntungan, kegunaan atau preferensi (Allison, 1971, hal. 29). Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

### **2.1.2 *Faktor Yang Mempengaruhi Goals and Objectives AS***

Aspek yang menjadi faktor Amerika Serikat memilih *goals and objectives* untuk mencegah Iran memproduksi WMD, salah satunya dapat dilihat dari faktor keuntungan. Keuntungan Amerika Serikat jika Iran tidak dapat mengembangkan



WMD dari program nuklirnya adalah keamanan wilayah yang berujung pada kebutuhan ekonomi Amerika Serikat dari wilayah tersebut terpenuhi. Di samping itu, kepentingan Amerika tersebut juga berkaitan dengan kepentingan negara mitra Amerika Serikat yaitu Israel dan Arab Saudi (Saunders, 1978).

Tujuan Amerika Serikat untuk menghentikan Iran mendapatkan WMD ini juga didorong oleh faktor kegunaan dilihat dari segi keamanan. *Goals and objectives* Amerika Serikat ini juga berguna bagi keamanan negara mitra Amerika Serikat, seperti Israel. Hal itu dikarenakan Iran pada masa Presiden Ahmadinejad mengancam akan menghapuskan Israel dari peta dunia. Terkait hal itu jika Iran memiliki senjata nuklir atau WMD maka keamanan Israel akan semakin terancam (Teitelbaum, 2008).

Faktor lainnya yang mendorong Amerika Serikat mengambil tujuan menghentikan program nuklir Iran adalah adanya preferensi Amerika Serikat untuk mencegah proliferasi nuklir. Dalam kasus ini di wilayah Timur Tengah, sesuai dengan fokus preferensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam dunia internasional pada masa Barack Obama, yaitu mengurangi ketidakamanan dunia internasional terhadap senjata nuklir. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh negara lain dapat menimbulkan adanya rasa tidak aman pada negara yang lainnya. Dalam hal ini kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dapat memberikan ketidakamanan pada Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, khususnya negara di wilayah Timur Tengah. Jika wilayah Timur Tengah mengalami ketidakstabilan keamanan maka hal ini juga akan merugikan bagi Amerika Serikat dikarenakan cukup banyaknya kepentingan Amerika Serikat di

wilayah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Graham T. Allison dalam *Rational Choice*-nya :

*“National security and national interests are the principal categories in which strategic goals are conceived.”* - (Allison, 1971, hal. 33)

Oleh karena itu, keamanan dan kepentingan Amerika Serikat juga menjadi hal yang mendorong Amerika Serikat untuk memilih tujuan dari kebijakannya yaitu menghentikan proliferasi nuklir Iran agar Iran tidak dapat menghasilkan WMD.

Menurut Allison, setiap tujuan yang diambil oleh seorang agen atau aktor negara memiliki *side effects*-nya masing-masing. Negara seharusnya dapat mengukur skala konsekuensi dari setiap tujuan yang diputuskan terkait suatu isu (Allison, 1971, hal. 29). Pada isu ini jika Presiden Barack Obama tidak mengambil tujuan untuk menghentikan proliferasi nuklir Iran maka Amerika Serikat akan menghadapi beberapa hal yang cukup merugikan, seperti ketidakamanan wilayah di Timur Tengah akan meningkat akibat adanya kepemilikan senjata nuklir oleh Iran. Hal itu akan menghambat dan mengancam berbagai kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Selain itu juga, adanya ancaman keamanan terhadap negara mitra Amerika Serikat di wilayah tersebut. Maka dari itu, menghentikan proliferasi nuklir Iran agar Iran tidak dapat memproduksi WMD ini menjadi tujuan yang rasional bagi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama (Sherman, 2018).

Pada bab ini telah dijelaskan mengenai *goals and objectives* terkait program nuklir Iran, terkait hal itu Amerika Serikat menentukan *goals and objectives*-nya, yaitu menghentikan upaya Iran dalam program nuklirnya sehingga

Iran tidak dapat memproduksi WMD. Tujuan tersebut dipilih berdasarkan dari segi keuntungan, kegunaan dan preferensi seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian tahap selanjutnya pada *Rational Choice* adalah menentukan *alternatives* kebijakan apa saja yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya tersebut. Tahap *Alternatives* ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

## **2.2 ALTERNATIVES**

Kebijakan Presiden Barack Obama memilih menghentikan proliferasi nuklir Iran yang dikhawatirkan pihak internasional akan berujung pada WMD sebagai sikap dan tujuan Amerika Serikat telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Kemudian pada sub-bab ini, akan menjelaskan mengenai pilihan kebijakan-kebijakan alternatif untuk mencapai tujuan Amerika Serikat tersebut.

Menurut Allison, pada setiap tujuannya pembuat kebijakan memiliki pilihan kebijakan-kebijakan alternatif yang diambil guna mencapai tujuan tersebut sesuai dengan kondisi tertentu. Kebijakan alternatif tersebut memiliki spesifikasi tindakan yang cukup tepat untuk membedakannya dari alternatif lainnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada tahap *goals and objectives* (Allison, 1971, hal. 29-30). Terkait kasus program nuklir Iran, Presiden Barack Obama memiliki beberapa kebijakan alternatif yaitu, sanksi ekonomi, langkah militer lalu yang terakhir JCPOA. Kebijakan-kebijakan alternatif tersebut akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

### 2.2.1 Sanksi Ekonomi

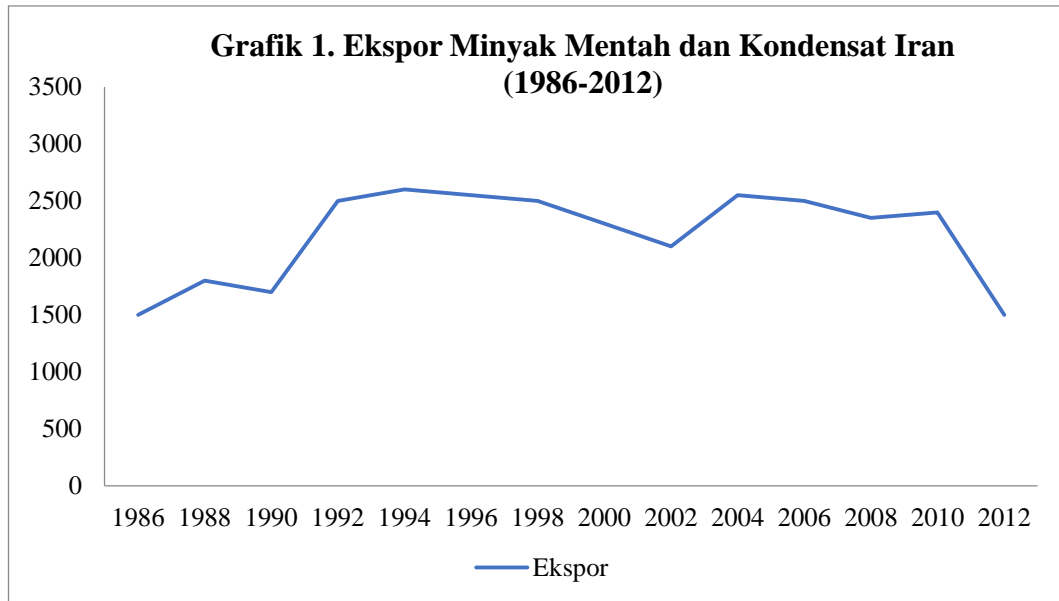
Presiden Barack Obama dalam menghadapi nuklir Iran, memilih pendekatan dengan jalur diplomasi. Pada tahun 2009, Iran mengajukan permohonan pada IAEA agar membantu Iran mendapatkan bahan bakar untuk TRR (*Tehran Research Reactor*). Menanggapi hal itu, Presiden Obama kemudian memberikan solusi berupa *Fuel – Swap* atau pertukaran bahan bakar. Selanjutnya Amerika Serikat dan Iran memulai negosiasi tentang program nuklir Iran di Geneva. Iran yang akan kekurangan bahan bakar pada tahun 2010 kemudian menyetujui proposal dari Amerika Serikat tentang pertukaran uraniumnya dengan bahan bakar bagi TRR yang digunakan Iran untuk kebutuhan medis. Dalam proposal itu Iran harus mengirimkan uraniumnya sejumlah 1.200 kg dari 1.600 kg pada Russia untuk pengayaan dan proses selanjutnya dikirim ke Perancis. Hal ini dilakukan agar persediaan uranium milik Iran berada pada batas wajar dan pengayaan uranium Iran menjadi lebih jelas kegunaannya (Fitzpatrick, 2010, hal. 68-69).

Pada perundingan selanjutnya tentang proposal pertukaran bahan bakar tersebut, Iran pada akhirnya menolak untuk menyetujui proposal ini. Hal yang membuat Iran keberatan dalam kesepakatan ini merupakan ketidaksetujuan Iran terhadap mekanisme pertukaran bahan bakar tersebut. Ketentuan dalam kesepakatan itu adalah Iran harus mengirimkan *Low Enriched Uranium* (LEU) sebelum bahan bakar yang dibutuhkan Iran diproduksi yang mana hal ini membutuhkan waktu 1 tahun setelah pengiriman uranium. Hal itulah yang meningkatkan kekhawatiran bagi Iran bahwa pihak Amerika Serikat dan negara

mitranya akan melanggar kesepakatan dengan tidak mengirimkan bahan bakar ataupun uranium milik Iran (Reardon, 2012, hal. 23).

Presiden Barack Obama telah melakukan beberapa kali negosiasi dengan Iran tentang program nuklirnya. Meskipun begitu, pada proses negosiasi tersebut kedua belah pihak belum menemukan solusi yang menguntungkan. Hingga Amerika Serikat dan negara mitranya memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi dengan tujuan menekan pihak Iran. Beberapa contoh sanksi ekonomi yang diberikan Presiden Barack Obama meliputi CISADA tahun 2010, USA PATRIOT Act dan NDAA FY tahun 2011, *Iran Freedom and Counter-Proliferation Act* tahun 2013. Sanksi utama Amerika Serikat terhadap Iran ini menitikberatkan pada sektor energi dan finansial. Pada sektor energi Amerika Serikat bekerja sama dengan EU agar penjualan minyak Iran menurun drastis sesuai dengan resolusi UN 1929. Sektor ini adalah sumber utama penghasilan ekonomi Iran sehingga sanksi ini akan sangat memberatkan bagi Iran (Samore, 2015, hal. 6-18).

Hal tersebut sesuai dengan *Rational Choice* Allison yang mengatakan bahwa kebijakan alternatif juga dipilih berdasarkan kondisi tertentu (Allison, 1971, hal. 29). Maka melihat sikap Iran yang cenderung kurang bisa diajak kerja sama tersebut, Amerika Serikat tidak menghentikan pemberian sanksi-sanksinya guna menekan Iran untuk maju berunding ke meja diplomasi dirasa sudah cukup tepat. Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut, salah satunya berdampak pada nilai tukar mata uang Rial Iran terhadap Dollar mengalami penurunan yang drastis sehingga keadaan perekonomian Iran menjadi semakin menurun (Gladstone, 2012).



Sumber : (US Energy Information Administration, 2013)

Ekonomi yang merupakan sumber kekuatan Iran untuk melaksanakan program nuklirnya mulai terganggu. Hal itu karena ekspor minyak sebagai sumber pendapatan terbesar dari negara tersebut telah mengalami penurunan. Selama ini salah satu faktor yang membuat Iran mampu untuk mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Amerika Serikat adalah berdasarkan sumber pendapatan mandiri negara tersebut. Jika pendapatan Iran melalui minyak ini berkurang karena faktor harga minyak menurun maupun jumlah ekspor yang menurun maka dari itu kemampuan pemerintah Iran untuk menentang kebijakan Amerika Serikat menjadi lebih berkurang (Crane, 2009, hal. 43-48). Bagan di atas telah menunjukkan bahwa ekspor minyak Iran mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2012. Hal itu disebabkan karena sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyasar sektor minyak Iran telah berhasil (US Energy Information Administration, 2013).

Mengetahui kondisi perekonomian Iran yang sedang mengalami resesi ini, Presiden Hassan Rouhani kemudian melakukan inisiatif untuk memulai diplomasi

dengan Amerika Serikat agar dapat membentuk kembali kerja sama antar kedua negara tersebut. Dalam upaya perbaikan diplomasi ini, Iran menginginkan Amerika Serikat agar mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang telah diberikan pada Iran (Rieffer-Flanagan, 2018, hal. 193-194). Akan tetapi, sebelum terjadi kesepakatan untuk bekerja sama itu, Amerika Serikat juga memiliki kebijakan alternatif lainnya, yaitu langkah militer yang akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

### **2.2.2 Langkah Militer**

Sebelum munculnya kerjasama antara Amerika Serikat dan Iran seperti yang telah dijelaskan di atas, Presiden Barack Obama juga memberikan alternatif kebijakan lainnya yaitu langkah militer. Alternatif kebijakan ini muncul dikarenakan sanksi-sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Barack Obama terkait program nuklir Iran itu masih belum terlihat adanya hasil yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan Amerika Serikat dalam isu program nuklir Iran. Hal ini membuat Presiden Barack Obama menentukan salah satu kebijakan alternatif lainnya yang akan diambil yaitu menggunakan jalur militer. Seperti yang dikatakan Barack Obama sebagai berikut :

*“Even before taking office, I made clear that Iran would not be allowed to acquire a nuclear weapon on my watch, and it’s been my policy throughout my presidency to keep all options -- including possible military options -- on the table to achieve that objective.” (Whitehouse, 2015)*

Alternatif kebijakan yang ditentukan oleh Presiden Barack Obama tersebut tidak langsung dilakukan karena Barack Obama juga mengatakan bahwa Amerika Serikat masih terbuka untuk menyelesaikan isu ini melalui jalur diplomasi. Langkah militer ini dengan kata lain menjadi opsi paling terakhir Presiden Barack

Obama jika isu program nuklir Iran ini tetap mengalami kebuntuan. Akan tetapi, diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran kemudian memberikan peluang munculnya kebijakan alternatif lainnya, yaitu JCPOA yang akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

### **2.2.3 Kesepakatan *Joint Comprehensive Plan Of Action* (JCPOA)**

Setelah adanya upaya perbaikan kerja sama Amerika Serikat dan Iran, muncul suatu kebijakan alternatif baru. Presiden Barack Obama membuat alternatif kebijakan ini di bawah naungan UNSC terkait dengan isu program nuklir Iran yaitu *Joint Comprehensive Plan Of Action* (JCPOA) atau dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran. JCPOA merupakan kesepakatan bersama antara Iran dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, Jerman juga Tiongkok. Kesepakatan ini bertujuan untuk mencegah Iran supaya tidak melakukan pengembangan senjata pemusnah massal dan mengawasi Iran agar program tersebut hanya digunakan sebatas untuk sumber energi dengan tujuan yang damai. JCPOA merupakan suatu capaian yang historis karena belum pernah ada Presiden sebelum Presiden Barack Obama yang memberikan kesempatan dan kesepakatan seperti JCPOA ini terkait isu program nuklir Iran (Vishwanathan, 2016, hal. 3-4).

Amerika Serikat dalam memutuskan kebijakan alternatifnya pada program nuklir Iran memiliki beberapa faktor yang pada akhirnya mendorong Presiden Barack Obama untuk membuka *alternatives* kebijakan lainnya selain *alternatives* yang telah disebutkan di atas yaitu, JCPOA. Pada sub-bab ini terlebih dahulu akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kesepakatan



JCPOA tersebut. Faktor tersebut terbagi menjadi tiga faktor yaitu faktor keamanan, faktor ekonomi dan faktor politik. Hal ini cukup penting untuk dibahas pada sub-bab ini karena faktor-faktor ini yang juga menjadi pertimbangan Presiden Barack Obama dalam menentukan kebijakannya.

Pada faktor keamanan, Amerika Serikat sebagai polisi dunia turut andil dalam keamanan di wilayah Timur Tengah. Salah satu isu program nuklir Iran ini menyebabkan ketidakstabilan keamanan di wilayah Timur Tengah dan untuk menunjukkan kredibilitas Amerika Serikat di wilayah ini maka Amerika Serikat ikut serta dalam proses penyelesaian isu tersebut. Dengan JCPOA maka Iran akan lebih membuka jalur diplomasi dengan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan lainnya yang ada di Timur Tengah, misalnya konflik Suriah dimana Iran juga ikut andil dalam konflik tersebut mendukung rezim Bashar Al- Assad (Esfandiary, 2016, hal. 232).

Faktor ekonomi yang mendorong Amerika Serikat untuk menentukan kebijakan JCPOA ini adalah sektor minyak. Iran memberikan ancaman pada Amerika Serikat dan negara mitranya juga negara-negara lain untuk menutup selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan minyak dunia. Jika Iran menutup selat tersebut maka akan mengacaukan perdagangan minyak dunia karena hampir seluruh perdagangan minyak di Timur Tengah melalui selat tersebut. Dengan kondisi itu tentu akan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat untuk berdamai dengan Iran melalui kesepakatan JCPOA (Hargreaves, 2012).

Faktor politik yang mempengaruhi Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan kesepakatan nuklir Iran adalah hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara yang tergabung dalam JCPOA seperti Rusia, Tiongkok, Inggris,

Perancis dan Jerman. Negara-negara tersebut mendukung kesepakatan nuklir Iran ini terutama Rusia dan Tiongkok. Rusia dan Tiongkok mendukung kesepakatan JCPOA karena kedua negara tersebut menginginkan kestabilan kerja sama ekonomi dengan Iran. Sebelumnya negara-negara ini juga membantu Amerika Serikat dalam melancarkan sanksi terhadap Iran khususnya sanksi ekonomi pada pembelian minyak Iran (Mahapatra, 2016, hal. 38).

Sama halnya dengan pihak Rusia dan Tiongkok, JCPOA juga merupakan tawaran yang menarik bagi pihak EU agar dapat bekerja sama kembali dengan Iran pada sektor energi yang mana sebelumnya EU juga membantu Amerika Serikat memberikan sanksi Iran terhadap sektor energinya. Oleh karena itulah, Amerika Serikat membuat kebijakan alternatif JCPOA ini. Dan jika Amerika Serikat menolak terbentuknya kesepakatan ini maka Amerika Serikat akan berada pada posisi yang berseberangan dengan negara-negara tersebut sehingga hal ini akan mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara itu di masa depan (Vuković, 2015, hal. 88-90).

Faktor politik lainnya adalah pada awal pemerintahan Barack Obama khususnya tahun 2010 hingga 2012, kebijakan Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran adalah tetap fokus dalam memberikan sanksi seberat-beratnya untuk menekan Iran. Hingga pada tahun 2012, perekonomian Iran mulai mengalami resesi seperti yang telah dijelaskan di atas. Keberhasilan sanksi ekonomi yang diberikan secara terus menerus oleh Amerika Serikat dan negara mitranya inilah yang membawa Iran dan Amerika Serikat menuju jalur diplomasi. Meskipun begitu, Iran tetap tidak menyetujui jika harus menghentikan secara total program nuklirnya. Oleh karena itu, penawaran yang diajukan Presiden Barack Obama

beralih dari penghentian keseluruhan ke pembatasan aktifitas program nuklir agar Iran tidak dapat membuat senjata nuklir secara diam-diam seperti yang telah dijelaskan di atas (Mousavian, 2017, hal. 72-74).

Di samping itu, Amerika Serikat juga memanfaatkan momentum *Arab Spring* yang mana kawasan Timur Tengah sedang tidak stabil akibat *Arab Spring* berpengaruh terhadap kondisi Iran. Di tengah himpitan sanksi ekonomi maupun politik dari pihak Amerika Serikat dan negara mitranya juga ditambah dengan tekanan ketidakstabilan wilayah regional akibat *Arab Spring* maka hal-hal itu mendorong Iran untuk berkompromi dengan pihak Amerika Serikat terkait program nuklirnya agar sanksi-sanksi yang menimpanya dapat berkurang. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat hingga menghasilkan JCPOA (Chubin, 2012, hal. 14).

Sebelum disepakatinya JCPOA sebagai salah satu kebijakan *alternatives*, politik internal Amerika Serikat mengalami perdebatan antara partai Demokrat dan Republik. Dalam hal ini partai Demokrat mendukung kesepakatan nuklir Iran dan partai Republik menjadi pihak yang kontra. Meskipun begitu, pada akhirnya partai Demokrat berhasil memenangkan voting dengan mendukung kebijakan alternatif Presiden Barack Obama tersebut (Steinhauer, 2015).

Kesepakatan JCPOA ini di dalamnya terdapat berbagai regulasi yang telah disepakati untuk mewujudkan tujuan yang telah disebutkan pada tahap *goals and objectives*. Kesepakatan ini fokus pada program pengayaan uranium dan program reaktor air berat yang dapat digunakan Iran untuk memproduksi senjata nuklir. Dalam hal ini, Iran memiliki beberapa fasilitas yang menunjang proses tersebut, fasilitas itu berada di Natanz, Fordow dan Arak (Katzman, 2017, hal. 5-6).

Hal-hal penting yang kemudian disetujui dalam kesepakatan JCPOA ini sebagai berikut :

1. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada Iran terkait dengan isu program nuklir akan dicabut. Sanksi yang dicabut dalam poin ini adalah sanksi-sanksi yang hanya berkaitan dengan isu program nuklir Iran saja.
2. Kesepakatan untuk mengurangi uranium pada nuklir Iran sehingga Iran tidak bisa memproduksi WMD dilakukan melalui pembatasan pengayaan uranium Iran menjadi 3.67% selama 15 tahun dan Natanz menjadi satu-satunya lokasi untuk melakukan pengayaan uranium selama 15 tahun. Kemudian, Fasilitas nuklir di Fordow tidak boleh digunakan sebagai tempat pengayaan uranium dan hanya boleh digunakan sebagai tempat penelitian.
3. Kesepakatan untuk mengurangi jumlah reaktor air berat milik Iran dilakukan dengan mendesain ulang reaktor air berat di Arak dengan daya yang lebih rendah dan selama 15 tahun Iran tidak diperbolehkan untuk memproduksi reaktor air berat.
4. Pengawasan ketat dari pihak IAEA terhadap program nuklir Iran dan transparansi dari pihak Iran untuk memberitahukan seluruh kegiatan program nuklirnya selama ini sehingga Iran tidak bisa melakukan pengayaan nuklir secara diam-diam (Katzman, 2017, hal. 27-31)

Adapun hal yang membuat Iran menyetujui kesepakatan itu adalah Iran diberikan kebebasan dari sanksi-sanksi terkait dengan isu pengembangan nuklir yang telah dijatuhkan pada Iran sebelumnya (Katzman, 2015, hal. 7-9). Dengan disepakatinya JCPOA dan berada di bawah pengawasan yang semakin ketat dari

IAEA tersebut maka diharapkan Iran akan lebih transparan dalam proses program nuklirnya. Di samping itu, Iran cenderung tidak akan melanggar kesepakatan ini dilihat dari sanksi-sanksi yang telah dicabut dapat diberlakukan kembali yang tentunya akan membuat Iran mempertaruhkan aspek ekonomi dan politiknya. Seperti yang dikatakan Presiden Barack Obama dalam pidatonya :

*“And finally, Iran has powerful incentives to keep its commitments. Before getting sanctions relief, Iran has to take significant, concrete steps like removing centrifuges and getting rid of its stockpile. If Iran violates the agreement over the next decade, all of the sanctions can snap back into place...” – (Obama, 2015)*

Selain itu, beberapa partner dagang terbesar Iran berada dalam kesepakatan tersebut seperti EU dan Tiongkok, sehingga Iran akan berpikir ulang untuk melanggar kesepakatan nuklir Iran ini (Habibi, 2018, hal. 2-4). Dengan adanya pengalaman Iran dalam menerima sanksi akibat program nuklirnya, maka dengan kesepakatan seperti ini Iran akan lebih memilih untuk mengurangi uranium dan mendapatkan pengawasan ketat dari pihak IAEA daripada dijatuhi sanksi-sanksi yang memberatkan Iran secara ekonomi maupun politik. Meskipun sanksi yang dicabut hanya sanksi yang berkaitan dengan program nuklir dan sanksi lainnya seperti sanksi karena Iran mendukung terorisme, melanggar HAM, *Money Laundering* dan pengembangan misil balistik tidak dicabut. Kesepakatan ini tetap menguntungkan bagi Iran untuk mengurangi beban sanksinya (Samore, 2015, hal. 22-24).

Dalam model *Action as Rational Choice*-nya, Allison mengatakan bahwa kebijakan alternatif yang diambil seharusnya memiliki perbedaan dari alternatif-alternatif lainnya :

*“...The specification of a course of action must be sufficiently precise to differentiate it from other alternatives.” (Allison, 1971, hal. 30).*

JCPOA sendiri merupakan alternatif kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pendekatan untuk melakukan kesepakatan nuklir dengan Iran ini pertama kali dilakukan oleh Presiden Barack Obama. Hal itulah yang membedakan JCPOA dengan kedua opsi lainnya.

Menurut Allison, kebijakan alternatif tersebut dapat kita gambarkan sebagai *decision tree* (Allison, 1971, hal. 29-30). Sesuai dengan hal itu, kebijakan Amerika Serikat seperti sanksi ekonomi dan opsi langkah militer merupakan suatu paket kebijakan dalam *decision tree* yang telah diperkirakan akibat selanjutnya oleh Presiden Barack Obama dari kebijakan tersebut. Dalam kasus ini, kedua kebijakan alternatif Barack Obama itu pada akhirnya menjadi pemicu bagi Iran untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sehingga memunculkan kebijakan alternatif baru yang lebih mendekati tujuan Amerika Serikat pada isu ini, yaitu JCPOA.

Pada bab ini telah membahas mengenai *alternatives* Amerika Serikat pada masa Barack Obama terkait program nuklir Iran. Terkait dengan hal tersebut, *alternatives* yang dihasilkan Amerika Serikat dalam isu program nuklir Iran adalah sanksi ekonomi, langkah militer dan yang terakhir JCPOA. Sesuai dengan teori Allison, tahap selanjutnya setelah menentukan *alternatives* adalah tahap *consequences* dan *choice*. Tahap *consequences* dan *choice* ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

**BAB III**

**ANALISIS *CONSEQUENCES* DAN *CHOICE* AMERIKA SERIKAT**

**TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai *goals and objectives* Amerika Serikat pada program nuklir Iran yang menghasilkan tujuan Amerika Serikat yaitu menghentikan Iran pada program nuklirnya untuk mendapatkan WMD. Kemudian pada tahap *alternatives*, Barack Obama memiliki beberapa alternatif kebijakan seperti sanksi ekonomi, langkah militer dan JCPOA. Kemudian sesuai dengan model *Rational Choice* oleh Allison, tahap selanjutnya dalam menganalisis adalah *consequences* dan *choice*. Kedua tahap tersebut akan dipaparkan lebih jelas dalam bab ini.

**3.1 *CONSEQUENCES***

Poin dalam *Rational Choice* oleh Graham T. Allison yang selanjutnya adalah *Consequences*. Pada tahap ini kebijakan-kebijakan alternatif yang telah dijelaskan di atas memiliki konsekuensinya masing-masing (Allison, 1971, hal. 30). Menurut Allison, pada setiap konsekuensi-konsekuensi tersebut pembuat kebijakan dapat memetakan *costs* dan *benefits* apa saja yang akan di dapatkan sesuai dengan tujuan negara dalam suatu isu :

*“The relevant consequences constitute benefits and costs in terms of strategic goals and objectives.” (Allison, 1971, hal. 33).*

Mengacu pada Allison, maka pada penjelasan *costs* dan *benefits* pada tahap *consequences* dari kebijakan alternatif Amerika Serikat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. *Costs* dan *Benefits* Kebijakan Alternatif Amerika Serikat

<b>Alternatives</b>	<b>Costs</b>	<b>Benefits</b>
Sanksi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak efektif secara waktu</li> <li>- Belum terbukti dapat mencapai tujuan Amerika Serikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resesi ekonomi Iran → Kerjasama Amerika Serikat – Iran</li> </ul>
Langkah Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakstabilan keamanan Timur Tengah meningkat</li> <li>- Belum tentu tujuan Amerika Serikat pada program nuklir Iran tercapai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemungkinan tujuan Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklir Iran tercapai</li> </ul>
JCPOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iran tetap menjalankan program nuklirnya</li> <li>- Ketidaksetujuan negara mitra Amerika Serikat</li> <li>- Jangka waktu JCPOA</li> <li>- Menguatnya pengaruh Iran yang kemungkinan dapat mengancam kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah Iran memproduksi WMD</li> <li>- Keuntungan Ekonomi</li> <li>- Keuntungan Politik</li> <li>- Keuntungan Keamanan</li> <li>- Informasi program nuklir Iran</li> <li>- Kerja sama terkait pengetahuan nuklir</li> <li>- Pelepasan Tahanan Amerika Serikat</li> </ul>



Konsekuensi dari kebijakan-kebijakan alternatif Amerika Serikat terkait program nuklir Iran telah dipaparkan pada tabel di atas, kemudian penjelasan yang lebih detail akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

### **3.1.1 Konsekuensi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat**

#### ***A. Benefits Sanksi Ekonomi***

Kebijakan alternatif berupa sanksi ekonomi seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya juga memiliki *benefit*-nya sendiri, yaitu adanya resesi ekonomi Iran tahun 2012. Sanksi ekonomi itu menyebabkan jatuhnya ekspor minyak Iran sebesar 45%, bisnis-bisnis Iran mulai mengalami kesulitan, partner dagang Iran mulai mencari partner dagang yang lain dan sejenisnya. Kondisi Iran tersebut menguntungkan bagi Amerika Serikat karena kekuatan Iran untuk melawan Amerika Serikat menjadi berkurang (Khajehpour, 2013). Akan tetapi, meskipun kebijakan alternatif sanksi ekonomi tersebut membuahkan suatu hasil, kebijakan ini dalam prosesnya tetap belum bisa mencapai tujuan Amerika Serikat dalam isu program nuklir Iran.

#### ***B. Costs Sanksi Ekonomi***

Mengacu pada model pengambilan kebijakan tersebut, *costs* pada kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat terletak pada tidak efektifnya sanksi yang dilakukan. Sanksi tersebut menjadi tidak efektif karena menurut Presiden Barack Obama, sanksi-sanksi itu tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan Amerika Serikat terkait program nuklir Iran. Selain itu, dalam penerapannya Amerika Serikat juga harus memberikan sanksi hingga beberapa sanksi dan Amerika Serikat pun juga harus bekerja sama dengan negara-negara

lain seperti EU untuk menerapkan sanksi yang ‘efektif’. Kemudian, *costs* yang kedua menurut Barack Obama jika Amerika Serikat meneruskan sanksi justru akan menambah waktu bagi Iran untuk mengembangkan program nuklirnya dan Amerika Serikat tidak dapat informasi akurat tentang sampai manakah program nuklir tersebut dibangun (Parsi, 2017, hal. 324).

### **3.1.2 Konsekuensi Langkah Militer**

#### ***A. Benefits Langkah Militer***

Kebijakan alternatif langkah militer ini juga memiliki *benefit*, yaitu langkah militer diperkirakan dapat menghentikan program nuklir Iran. Hal itu bisa dicapai jika langkah militer ini dilakukan dengan strategi yang hati-hati. Kemudian, jika langkah militer ini berhasil akan ada kemungkinan bahwa isu keamanan dari ancaman nuklir Iran di wilayah Timur Tengah dapat terwujud dalam jangka waktu yang lama (Kroenig, 2012, hal. 77).

Jika langkah militer tersebut berhasil maka akan muncul kemungkinan untuk Amerika Serikat menggulingkan rezim pemerintahan Iran dan menggantikannya dengan rezim yang lebih pro terhadap Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat akan lebih mudah untuk mengatur Iran dan mencegah Iran melakukan proliferasi nuklir (Özcan, 2009, hal. 128-129). Meskipun begitu, pada prakteknya langkah militer ini memiliki *costs* yang cukup banyak. *Costs* tersebut akan dibahas selanjutnya pada sub-bab berikut.

#### ***B. Costs Langkah Militer***

Kebijakan alternatif selanjutnya yaitu langkah militer juga menjadi kebijakan alternatif bagi Presiden Barack Obama terkait program nuklir Iran.

*Costs* dari langkah militer ini jelas bahwa kebijakan ini cenderung merugikan dan memberikan kerugian yang lebih besar bagi Amerika Serikat, mulai dari biaya perang dan senjata, kemudian tentara yang dikorbankan dan citra Amerika Serikat di dunia juga dipertaruhkan. Citra Amerika Serikat dalam hal ini adalah jika Amerika Serikat melakukan penyerangan terlebih dahulu pada Iran maka negara-negara lain akan memandang buruk citra Amerika Serikat. Selain itu, jika terjadi perang antara Amerika Serikat dan Iran akan lebih memperbesar ketidakstabilan keamanan wilayah di Timur Tengah. Hal itu dikarenakan adanya kemungkinan bahwa Iran akan melakukan tindakan balasan yang mana akan ada eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran (Sharp, 2009, hal. 5-6).

Di sisi lain kemungkinan untuk mencapai tujuan Amerika Serikat dengan langkah militer ini juga belum dapat dipastikan karena Amerika Serikat tidak mengetahui secara pasti dimana saja letak fasilitas nuklir Iran dan informasi mengenai nuklir Iran. Hal itu menyebabkan sulitnya langkah militer dilakukan karena informasi Amerika Serikat masih terbatas (Kroenig, 2012, hal. 79-80).

Di samping itu, adanya fenomena *Arab Spring* dan berbagai krisis di Timur Tengah membuat Presiden Barack Obama berpikir dua kali untuk langsung menerapkan opsi melalui jalur militer dalam menyelesaikan masalah program nuklir Iran ini. Hal itu karena melihat kondisi Timur Tengah yang keamanannya sudah tidak stabil sejak terjadi *Arab Spring*. Dan dengan langkah militer terhadap Iran justru akan menyebabkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Di samping itu, Presiden Barack Obama juga mempertimbangkan kemungkinan Iran dapat membantu Amerika Serikat dalam menyelesaikan krisis di Timur Tengah jika Amerika Serikat dan Iran bekerjasama (Mousavian, 2018, hal. 14-17).

Sesuai dengan model *Rational Choice* oleh Allison bahwa kebijakan alternatif sanksi ekonomi dan langkah militer memperlihatkan bahwa *benefits* dan *costs*-nya tidak sesuai dengan tujuan Amerika Serikat dalam program nuklir Iran. Berbeda dengan JCPOA yang mana *benefits* dan *costs*-nya sesuai dengan tujuan Amerika Serikat. Selanjutnya akan lebih fokus pada kebijakan alternatif terakhir Amerika Serikat terkait program nuklir Iran, yaitu JCPOA. Sesuai dengan model pengambilan kebijakan dari Allison, JCPOA juga memiliki *costs* dan *benefits*-nya sendiri. Sebelumnya, JCPOA adalah kesepakatan antara Iran dan negara P5+1 guna mencegah Iran mengembangkan senjata pemusnah massal dengan program nuklirnya (Katzman, 2017, hal. 5-6).

### **3.1.3 Konsekuensi *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)***

#### **A. *Benefits JCPOA***

*Benefits* JCPOA bagi Amerika Serikat salah satunya adalah Iran bersedia untuk mengurangi aktivitas program nuklirnya sehingga Iran tidak dapat mengembangkan WMD. Hal itu merupakan *benefit* karena salah satu tujuan Amerika Serikat dalam kebijakannya terhadap Iran adalah menghentikan Iran untuk mendapatkan WMD. Hal tersebut bermanfaat bagi keamanan dunia terutama wilayah Timur Tengah dan dengan keamanan yang lebih stabil maka Amerika Serikat akan lebih mudah untuk menjalankan kepentingannya di Timur Tengah (Sterio, 2016, hal. 81-82).

Jika kita melihat sejarah isu program nuklir Iran, belum ada kesepakatan yang pasti dalam menanggulangi isu tersebut. Jika Presiden Obama tidak mengambil kesempatan ini maka situasi di Timur Tengah akan lebih bergejolak

dan berdampak pada stabilitas keamanan Timur Tengah. Dengan kesepakatan ini maka ketidakstabilan keamanan Timur Tengah tidak akan bertambah lebih parah. Hal ini merupakan manfaat bagi Amerika Serikat agar dapat melangsungkan kepentingannya di wilayah Timur Tengah (Mogherini, 2017).

Kestabilan keamanan wilayah Timur Tengah tersebut juga berkaitan dengan kepentingan keamanan negara mitra Amerika Serikat yang berada di kawasan tersebut, yaitu Israel. Keamanan Timur Tengah menjadi kepentingan bagi Amerika Serikat, selain bahwa hal itu berkaitan dengan keamanan Israel, tetapi di sisi lain juga menguntungkan bagi Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kawasan Timur Tengah yang stabil akan membantu pemenuhan kebutuhan sumber daya alam maupun ekonomi bagi Amerika Serikat (Mueller, 2017, hal. 2).

Terkait kepentingan keamanan negara mitra Amerika Serikat tersebut, Israel beranggapan bahwa program nuklir Iran merupakan ancaman bagi keamanan negaranya. Oleh karena itu, Israel mengajak Amerika Serikat untuk melakukan operasi militer terhadap program nuklir Iran. Akan tetapi, hal itu ditolak oleh Barack Obama (Zanotti, 2012, hal. 1-2). Barack Obama beranggapan bahwa JCPOA merupakan kesepakatan yang paling tepat karena kesepakatan ini bisa menghentikan Iran mendapatkan senjata nuklir sekaligus Amerika Serikat melindungi keamanan Israel dari ancaman tersebut seperti yang telah disebutkan di atas (Edwards, 2015).

Kepentingan Amerika Serikat tidak hanya meliputi kepentingan keamanan, tetapi JCPOA juga memberikan *benefits* secara ekonomi. Dalam JCPOA juga tertulis kesepakatan bahwa Iran tidak diperbolehkan memperbanyak

jumlah ketersediaan reaktor air berat selama 15 tahun. Oleh karena itu, kelebihan reaktor air berat milik Iran dapat diekspor ke pasar internasional.

*“There will be no additional heavy water reactors or accumulation of heavy water in Iran for 15 years. All excess heavy water will be made available for export to the international market.” (JCPOA, 2015).*

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Amerika Serikat memanfaatkan momen ini untuk menandatangani kesepakatan pembelian reaktor air berat milik Iran sejumlah 32 ton dengan harga 8,6 juta dolar. Reaktor air berat ini dapat digunakan sebagai salah satu komponen nuklir. Reaktor air berat tersebut akan digunakan Amerika Serikat untuk penelitian dan sebagian dijual ke perusahaan privat Amerika Serikat yang menggunakan reaktor air berat untuk kebutuhan industrinya. Di samping itu, Amerika Serikat tidak memproduksi reaktor air berat ini secara domestik sehingga hal ini menguntungkan bagi Amerika Serikat (Davenport, 2016).

JCPOA juga memberikan *benefits* ekonomi lainnya, yaitu manfaat bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang sebelumnya tidak bisa berbisnis di Iran karena sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dalam JCPOA, pencabutan sanksi-sanksi terhadap Iran juga bermanfaat bagi perusahaan Amerika Serikat, seperti *General Electric* (GE). CEO dari GE bagian minyak dan gas memanfaatkan momentum dimana Iran dibebaskan sanksinya pada sektor minyak mentah (Young, 2016). Selain GE, ada beberapa perusahaan Amerika Serikat lainnya yang bekerja sama dengan Iran setelah sanksi dihapuskan, seperti Honeywell, Dover (DOV) dan Boeing yang telah bersepakat dengan Iran untuk penjualan 110 pesawat jet (Egan, 2018).

Tidak hanya keamanan dan ekonomi yang menjadi *benefits* dari kesepakatan JCPOA ini. Tetapi, JCPOA juga membawa keefektifan bagi Amerika Serikat, Iran dan negara lainnya yaitu mereka dapat lebih fokus untuk menyelesaikan masalah lain. Sehingga tidak hanya terus menerus mencari penyelesaian pada isu ini saja, sehingga dapat lebih fokus untuk menyelesaikan isu-isu yang lainnya seperti misalnya masalah misil balistik Iran (Taleblu, 2018, hal. 1-2).

Di samping keefektifan JCPOA sebagai solusi isu program nuklir Iran, kesepakatan nuklir Iran tersebut juga merupakan pencapaian yang baik dalam memberikan kejelasan informasi terkait program nuklir Iran. Hal itu didukung oleh Presiden Barack Obama yang dalam pidatonya mengatakan bahwa :

*“Before the deal, the world had relatively little visibility into Iran’s nuclear program. Today, international inspectors are on the ground, and Iran is being subjected to the most comprehensive, intrusive inspection regime ever negotiated to monitor a nuclear program. Inspectors will monitor Iran’s key nuclear facilities 24 hours a day, 365 days a year. For decades to come, inspectors will have access to Iran’s entire nuclear supply chain. In other words, if Iran tries to cheat -- if they try to build a bomb covertly -- we will catch them.” - (Obama, 2016)*

Kutipan dari Presiden Barack Obama tersebut menjelaskan bahwa dalam kesepakatan JCPOA, Iran akan mendapatkan pengawasan ketat pada program nuklirnya yang berarti kesepakatan ini memberikan kejelasan informasi dalam proses program nuklir Iran bagi kedua belah pihak antara Iran maupun negara yang tergabung dalam kesepakatan JCPOA juga negara-negara lainnya. Kesepakatan JCPOA membuka lebih lebar gerbang informasi tentang program nuklir Iran yang lebih detail bagi Amerika Serikat di mana sebelumnya Iran cenderung tertutup terhadap program nuklirnya. Informasi tersebut tentu akan sulit didapatkan oleh Amerika Serikat jika Amerika Serikat tidak menyepakati

JCPOA ini. Hal inilah yang tentu menjadi pertimbangan bagi Presiden Barack Obama.

Kejelasan informasi bagi Amerika Serikat tersebut memberikan *benefits* bagi Amerika Serikat untuk menghalau Iran mengembangkan program nuklir secara diam-diam. Keterbukaan informasi itu akhirnya menghasilkan beberapa tindakan untuk menghalau Iran mendapatkan WMD, seperti mengganti situs pengayaan di Fordow menjadi tempat untuk keperluan fasilitas medis. Hal itu berarti Iran telah mengurangi persediaan LEU sebesar 8.000 kg menjadi 300 kg. Tidak hanya itu, hal ini juga menghalau Iran memproduksi Plutonium yang digunakan dalam senjata nuklir (Mousavian, 2018, hal. 23-25).

Terkait dengan hal itu jika Amerika Serikat tidak menyepakati JCPOA maka Amerika Serikat akan sulit untuk memiliki informasi terkait sampai mana program nuklir Iran telah dibangun. Jika Iran memiliki senjata nuklir, hal itu akan menyebabkan ketidakamanan Amerika Serikat dan wilayah Timur Tengah. Selain itu, akan lebih lama lagi negosiasi yang dibutuhkan. Selama negosiasi itu terus berlanjut maka itu adalah kesempatan yang baik bagi Iran untuk mengembangkan program nuklirnya (Sherman, 2018).

*Benefits* JCPOA lainnya yang tidak kalah penting dari kejelasan informasi bagi Amerika Serikat adalah pelepasan tahanan para warga Amerika Serikat oleh Iran. Akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang semakin memanas, beberapa warga negara Amerika Serikat kemudian dipenjara oleh Iran. Tetapi berkat kesepakatan nuklir Iran ini, akhirnya Iran melepaskan para tahanan Amerika Serikat tersebut (Erdbrink, 2016).



Di samping pelepasan tahanan Amerika Serikat oleh Iran, JCPOA juga memiliki salah satu *benefits* yang cukup besar bagi politik Amerika Serikat. Dalam hal ini citra Amerika Serikat sebagai polisi dunia semakin membaik karena adanya kesepakatan JCPOA tersebut membuktikan bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menertibkan negara-negara di dunia khususnya dalam isu program nuklir Iran ini. Negara-negara P5+1 yang tergabung dalam JCPOA akan meningkatkan kepercayaan mereka pada kepemimpinan Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat adalah negara yang dapat diandalkan dan dipercaya (Tabatabai, 2017, hal. 6-7).

Di samping mendapatkan *benefits* secara politik, keamanan dan ekonomi, Amerika Serikat juga mendapatkan *benefits* secara pengetahuan teknologi nuklir. Dalam JCPOA dikatakan bahwa fasilitas nuklir Iran di Fordow akan digunakan untuk keperluan pusat penelitian teknologi nuklir dan fisika. Pada hal ini akan ada kolaborasi secara internasional untuk berbagi ilmu pengetahuan dalam bentuk *Scientific Joint Partnerships* di beberapa area (JCPOA, 2015). Terkait hal itu ilmuwan Iran dan negara-negara P5+1 dapat bekerja sama dalam memajukan pengetahuan tentang teknologi nuklir (Stone, 2015).

Pada sub-bab ini telah dijelaskan berbagai *benefits* yang diperoleh Amerika Serikat dalam kesepakatan JCPOA, mulai dari manfaat politik, keamanan, ekonomi dan pengetahuan dalam bidang nuklir. Meskipun begitu, dalam kesepakatan JCPOA tetap ada konsekuensi yang mungkin tidak selamanya akan menguntungkan bagi pihak Amerika Serikat. *Costs* tersebut akan dijelaskan selanjutnya pada sub-bab berikut.

## ***B. Costs JCPOA***

Kesepakatan JCPOA ini memiliki beberapa *costs* yang menjadi tantangan dalam pengambilan kebijakan bagi Amerika Serikat seperti contohnya meskipun kesepakatan ini disetujui, Iran masih tetap bisa menjalankan program nuklirnya walaupun dalam batas-batas tertentu. Hal ini memberikan resiko pada Amerika Serikat dan negara mitranya, yaitu pengembangan program nuklir Iran yang dapat memberikan konsekuensi berupa menguatnya posisi Iran di kawasan Timur Tengah karena program nuklirnya tetap berjalan. Padahal pada awalnya tujuan Amerika Serikat adalah menghentikan Iran secara total dalam upaya program nuklir tersebut. Kesepakatan JCPOA ini memang bukanlah suatu kesepakatan yang menghentikan Iran secara keseluruhan pada program nuklirnya tetapi kesepakatan ini beresiko bahwa Iran akan tetap mengembangkan program nuklirnya sehingga Iran menjadi semakin kuat dan beresiko mengancam keamanan Timur Tengah di masa depan (Lappin, 2015).

Hal lainnya yang menjadi *costs* dalam pengambilan kebijakan untuk menyetujui JCPOA adalah kesepakatan ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu yang juga beresiko jika jangka waktu tersebut telah habis maka Iran akan tetap melanjutkan program nuklirnya dan dalam jangka waktu tersebut Iran dapat sedikit demi sedikit mengupayakan program nuklirnya, seperti contohnya JCPOA melarang Iran untuk melakukan pengayaan uranium selama 15 tahun dan pengawasan ketat dari IAEA selama 25 tahun. Setelah jangka waktu tersebut selesai, Iran akan bisa mengembangkan program nuklirnya dengan lebih masif (Sanger, 2015).

Di samping jangka waktu dalam JCPOA, *costs* yang kurang menguntungkan lainnya adalah ketidaksetujuan pihak Arab dan Israel terhadap kesepakatan ini yang berdampak pada hubungan Amerika Serikat dengan kedua negara itu terkait program nuklir Iran ini. Ketidaksetujuan kedua negara tersebut menjadi tantangan bagi Amerika Serikat karena Arab Saudi dan Israel adalah negara mitra terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap ketidakstabilan hubungan Amerika Serikat dan kedua negara tersebut. Arab tidak setuju pada kesepakatan ini salah satunya karena pencabutan sanksi pada sektor minyak Iran akan membuat harga minyak menjadi turun dan pasar minyak tidak dapat didominasi oleh Arab Saudi. Hal ini juga membuat hubungan Amerika Serikat dan Arab menjadi kurang harmonis (Pasha, 2016, hal. 7-8).

Kemudian faktor yang membuat Israel tidak setuju pada kesepakatan ini adalah kesepakatan nuklir Iran tetap memberikan ketidakstabilan keamanan bagi Israel karena Iran masih dapat menjalankan program nuklirnya meskipun telah dibatasi oleh JCPOA dan menurut Israel dengan dicabutnya sanksi ekonomi Iran maka Iran akan lebih masif dalam mengembangkan misil balistik milik Iran dan memberikan dana pada para kelompok teroris. Hal ini berdampak pada hubungan Amerika Serikat dan Israel menjadi kurang baik pada saat itu (Kaye, 2016, hal. 2-3).

Di samping itu, *costs* lain yang kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat adalah Iran dapat lebih memperkuat pengaruhnya di wilayah Timur Tengah karena memiliki fasilitas nuklir tersebut. Hal ini disebabkan karena sanksi-sanksi yang diberikan pada Iran telah dihapuskan dan Iran dapat

memberikan pengaruhnya yang lebih besar lagi melalui perdagangan dan kerja sama nuklir terhadap negara-negara lain di Timur Tengah. Selain itu, Iran juga sudah tidak diisolasi lagi secara diplomatik sehingga Iran dapat menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara sekaligus memperkuat pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Kemungkinan, tersebut dapat mengancam pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah (Norell, 2015, hal. 290-291).

Pada bab ini telah dijelaskan mengenai *Consequences* dari setiap kebijakan alternatif Amerika Serikat terkait program nuklir Iran, hasil dari tahap *consequences* ini mengacu pada model *Action as Rational Choice* Allison, pembuat kebijakan memilih konsekuensi yang relevan dengan mempertimbangkan *benefits* dan *costs* yang sesuai dengan *goals and objectives* negara tersebut (Allison, 1971, hal. 33). Hal ini sesuai dengan salah satu kebijakan alternatif Presiden Barack Obama yaitu JCPOA yang memiliki pertimbangan *benefits* dan *costs* sesuai dengan *goals and objectives* Amerika Serikat pada program nuklir Iran. Meskipun JCPOA memiliki beberapa *costs*, namun kesepakatan nuklir Iran ini tetap menjadi pilihan yang rasional bagi Amerika Serikat pada saat itu karena *benefits* yang didapatkan JCPOA lebih banyak daripada *costs* itu sendiri. Hal itu akan dipaparkan lebih jelas pada tahap model *Rational Choice* Graham T. Allison selanjutnya yaitu *Choice* yang akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

### 3.2 CHOICE

JCPOA merupakan kebijakan yang paling rasional terkait program nuklir Iran pada masa Presiden Barack Obama saat itu, dibandingkan dengan kebijakan alternatif lainnya seperti sanksi ekonomi dan langkah militer yang kemungkinan menjadi opsi merugikan bagi Amerika Serikat. Menurut Allison, tahapan yang terakhir dalam *Rational Choice* adalah *Choice* yang mana pembuat kebijakan memilih salah satu kebijakan yang paling memungkinkan suatu negara untuk mencapai tujuannya dalam suatu isu (Allison, 1971, hal. 29-30).

Kesepakatan JCPOA dipilih Presiden Barack Obama sebagai kesepakatan paling rasional terkait isu program nuklir Iran, salah satunya karena kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang paling tepat dalam menyoal langsung pada *goals and objectives* Amerika Serikat yaitu menghentikan Iran memproduksi WMD. JCPOA memiliki beberapa hal penting yang disepakati antara Iran dan negara-negara P5+1 dalam mewujudkan tujuan Amerika Serikat tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (Katzman, 2017, hal. 27-31).

Sesuai dengan model pengambilan kebijakan Allison yang telah dijelaskan dan mengacu pada data terkait JCPOA di atas, Presiden Barack Obama beranggapan bahwa kebijakan alternatif selain JCPOA ini kurang tepat, karena dibandingkan dengan JCPOA cenderung merugikan seperti kebijakan sanksi-sanksi ekonomi yang tidak efektif. Terlebih lagi opsi langkah militer merupakan opsi yang cenderung merugikan Amerika Serikat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek keamanan, ekonomi dan politik. Jika opsi militer ini dilakukan maka Amerika Serikat cenderung sulit untuk bekerja sama dengan Iran dan negara-negara yang terlibat seperti negara dalam P5+1 di masa depan.

Menurut Allison, pembuat kebijakan akan mempertimbangkan cara yang masuk akal untuk mencapai tujuannya (Allison, 1971, hal. 30). Sesuai dengan pernyataan Allison tersebut, JCPOA merupakan cara yang masuk akal dalam isu program nuklir Iran ini karena kesepakatannya menasar langsung pada permasalahan. Jika Amerika Serikat tidak menyepakati JCPOA dan memilih langkah militer, maka *costs* yang didapat akan lebih besar daripada *benefits*. Selain itu, upaya perbaikan citra politik Amerika Serikat di mata Internasional akan cenderung sulit dicapai. Dan adanya ketidakpastian tercapainya tujuan Amerika Serikat pada isu ini jika memilih opsi tersebut. Di samping itu, opsi lain seperti sanksi ekonomi terbukti tidak kunjung memberikan hasil yang sesuai dengan *goals and objectives* Amerika Serikat. Sehingga kedua alternatif tersebut bukan yang paling tepat diterapkan dalam isu ini (Obama, 2015).

Mengacu pada hal di atas, kesepakatan JCPOA ini dalam prosesnya akan memberikan hasil yang akurat sesuai dengan tujuan Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan Allison dalam model pengambilan kebijakannya bahwa :

*“The Rational Agent selects the alternative whose consequences rank highest in terms of his goals and objectives.” (Allison, 1971, hal. 33).*

JCPOA merupakan pilihan dimana konsekuensinya paling mendekati terkait tujuan Presiden Barack Obama pada program nuklir Iran dibandingkan kedua alternatif kebijakan lainnya, yaitu sanksi ekonomi dan langkah militer. JCPOA dalam hal ini memberikan pilihan untuk bisa menghentikan Iran memiliki senjata nuklir. Di samping itu, JCPOA memiliki banyak *benefits* lainnya dari segi keamanan, ekonomi, politik maupun pengetahuan teknologi seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika dilihat dari kondisi Amerika Serikat saat itu, maka

kesepakatan JCPOA ini adalah pilihan yang rasional. Dalam model pengambilan kebijakannya Allison mengatakan bahwa :

*“...But what guarantees that value-maximizing behavior within these parameters will in fact maximize the agent’s values? Obviously it would not, if the set of alternatives failed to include an option whose consequence ranked higher than any of the stated alternatives.” (Allison, 1971, hal. 31).*

Mengacu pada pernyataan Allison tersebut, keputusan pengambilan kebijakan JCPOA merupakan alternatif kebijakan yang belum pernah diupayakan sebelumnya dan potensi untuk berhasilnya cukup besar. Hal itu karena *benefits* yang telah disebutkan di atas lebih banyak daripada *costs* maka JCPOA adalah pilihan dengan konsekuensi yang paling memungkinkan Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pilihan kebijakan Barack Obama ini merupakan pilihan kebijakan paling rasional mengacu pada apa yang dimaksud oleh Graham T. Allison dalam *Rational Choice*-nya.

Pemetaan *Action as Rational Choice* pada keputusan kebijakan Presiden Barack Obama terkait isu program nuklir Iran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### 3.3. JCPOA Sebagai *Rational Choice* Presiden Barack Obama

<i>Action as Rational Choice</i>	Penjelasan Graham Allison	Sikap Obama dalam menghadapi Nuklir Iran
Goals and Objectives	Dalam menentukan tujuannya pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti keuntungan, kegunaan atau preferensi. Dari skala tujuannya tersebut maka pembuat kebijakan dapat memetakan kemungkinan yang akan terjadi jika mengambil tujuan itu.	Tujuan AS Dalam program nuklir Iran: menghentikan Iran mendapatkan WMD. Faktor yang mendorong yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuntungan : Kepentingan AS terjaga.</li> <li>• Kegunaan : Keamanan dari proliferasi nuklir serta keamanan negara mitra AS.</li> <li>• Preferensi : Politik untuk memperbaiki citra AS.</li> </ul>
Alternatives	Pada tahap ini pembuat kebijakan memilih dari beberapa alternatif yang tersedia sesuai dengan kondisi tertentu dan alternatif itu memiliki spesifikasi tindakan yang cukup tepat untuk membedakannya dari alternatif lainnya sehingga sesuai dengan tujuannya. Hal itu direpresentasikan sebagai <i>decision tree</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi : Agar Iran mau bekerja sama.</li> <li>• Langkah militer : Opsi terakhir jika mengalami kebuntuan dari sanksi.</li> <li>• JCPOA : Adanya upaya kerja sama Iran – AS. Belum pernah dicoba sebelumnya, JCPOA menjadi pilihan Barack Obama.</li> </ul>
Consequences	Pada setiap kebijakan alternatif tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Penentuan konsekuensi yang relevan mempertimbangkan <i>benefits</i> dan <i>costs</i> sesuai dengan tujuannya.	Sanksi-sanksi Amerika Serikat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benefit</i> : Resesi ekonomi Iran → Kerja sama Iran-AS.</li> <li>• <i>Costs</i> : Konsekuensinya tidak efektif secara waktu dan terbukti belum bisa mencapai tujuan Amerika Serikat.</li> </ul> Langkah militer Amerika Serikat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benefit</i> : Kemungkinan Iran akan menghentikan program nuklirnya.</li> <li>• <i>Costs</i> : Ketidakstabilan keamanan meningkat dan belum tentu tercapai tujuan Amerika Serikat.</li> </ul> JCPOA : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benefits</i> : Mencegah Iran memproduksi WMD, keuntungan Ekonomi, Politik, Keamanan, Informasi nuklir Iran, pelepasan tahanan AS &amp; Pengetahuan nuklir.</li> <li>• <i>Costs</i> : Iran tetap menjalankan program nuklir, Ketidaksetujuan negara mitra AS, Jangka waktu JCPOA, Menguatnya pengaruh Iran yang kemungkinan akan mengancam kepentingan AS.</li> </ul>



Choice	Pembuat kebijakan menentukan satu pilihan dari beberapa kebijakan alternatif yang menurutnya paling memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Hal ini ditandai dengan konsekuensi dari kebijakan tersebut yang paling mendekati tujuan pembuat kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Choice</i> : JCPOA</li> <li>• Alasan : Pilihan itu karena JCPOA memiliki <i>benefits</i> yang lebih banyak dibandingkan <i>costs</i>-nya dan JCPOA adalah kebijakan paling sesuai dengan tujuan Amerika Serikat.</li> </ul>
--------	--	---

Pada bab II dan III ini sudah dijelaskan mengenai JCPOA sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan kebijakan Presiden Barack Obama terkait program nuklir Iran. Penjelasan ini sesuai dengan model *Action as Rational Choice* dari Graham T. Allison. JCPOA dipilih karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang konsekuensinya paling mendekati tujuan Amerika Serikat pada masa Barack Obama. Hal itu dikarenakan pada tahap *alternatives* terdapat dua opsi lainnya yang kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian pada tahap *consequences*, JCPOA adalah kebijakan alternatif yang konsekuensinya paling mendekati *goals and objectives* pada masa Obama seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

Hal itu dibandingkan dengan *consequences* dari kedua alternatif lainnya seperti yang sudah dibahas pada bab ini juga. Maka, *Rational Choice* yang dihasilkan dalam kondisi masa pemerintahan Presiden Barack Obama tersebut adalah JCPOA. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa, jika pemetaan variabelnya dalam tahap *goals and objectives* juga *alternatives* dan *consequences* berbeda maka *choice* yang dihasilkan pun akan berbeda.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Latar belakang dari isu program nuklir Iran ini dimulai dari adanya pelanggaran Iran terhadap *Non Proliferation Treaty* (NPT), salah satunya karena Iran tidak melaporkan situs pengayaan uraniumnya. Padahal Iran telah menandatangani dan meratifikasi NPT pada tahun 1970. Di samping itu, Iran juga sempat menolak adanya inspeksi dari pihak IAEA pada program nuklirnya. Hal itu menimbulkan adanya kecurigaan dari pihak internasional bahwa Iran mengembangkan program nuklirnya menjadi *Weapon of Mass Destruction* (WMD). Kekhawatiran tersebut akhirnya meningkatkan ketidakamanan di wilayah Timur Tengah.

Meningkatnya ketidakamanan di wilayah Timur Tengah akibat nuklir Iran ini juga dinilai sebagai ancaman keamanan bagi Amerika Serikat. Hal itu didasari kepentingan Amerika Serikat untuk menjaga keamanan wilayah Timur Tengah agar berbagai kepentingan Amerika Serikat tetap terpenuhi seperti contohnya sumber daya alam. Selain itu, kepentingan menjaga keamanan negara mitra Amerika Serikat seperti Israel dan Arab Saudi juga menjadi prioritas dalam kasus ini. Oleh karena itu, Presiden Barack Obama membuat kebijakan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) untuk menghalau Iran memproduksi senjata pemusnah massal.

JCPOA sendiri merupakan sebuah kesepakatan nuklir antara negara-negara P5+1 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Jerman, Perancis dan Tiongkok dengan Iran untuk memastikan program nuklir Iran berjalan sesuai

dengan aturan. Iran menyepakati JCPOA karena meminta keringanan sanksi-sanksi yang telah diberikan oleh Amerika Serikat dan negara mitranya. Strategi yang digunakan Presiden Barack Obama tersebut menarik karena Presiden Amerika Serikat sebelumnya, belum pernah mencoba upaya kerja sama dengan Iran terkait isu program nuklirnya. Terkait hal itu, proses pengambilan kebijakan Presiden Barack Obama inilah yang menarik untuk dikaji.

Pada Bab I telah dijelaskan mengenai hubungan Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran dan apa saja upaya Presiden Barack Obama dalam menanggulangi isu tersebut. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai landasan model yang digunakan, yaitu model *Action as Rational Choice* oleh Graham T. Allison. Landasan tersebut dipilih guna menjawab rumusan masalah pada skripsi ini yaitu, bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama terkait program nuklir Iran?

Kemudian, pada Bab II menjelaskan mengenai analisis proses pengambilan kebijakan Barack Obama dalam isu program nuklir Iran melalui kacamata *Rational Choice* dari Allison. Dalam model pengambilan kebijakannya Allison membagi menjadi 4 asumsi dasar, yaitu *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences* dan *Choice*. Pada bab ini telah dijelaskan tahap *Goals and Objectives*, Obama menentukan tujuan Amerika Serikat untuk menghalau Iran dalam memproduksi WMD. Pada tujuan itu terdapat beberapa aspek sesuai *Rational Choice* seperti yang telah dijelaskan pada bab ini. Lalu bab II juga membahas tahap *Alternatives*, pada tahap ini Obama menentukan kebijakan alternatif yang memiliki spesifikasi tindakan cukup tepat untuk membedakannya dari kebijakan alternatif lainnya. Kebijakan alternatif Obama pada kasus ini

adalah sanksi ekonomi, langkah militer dan JCPOA. Perbedaan JCPOA dari kedua alternatif lainnya, yaitu JCPOA merupakan kebijakan yang pertama kali dilakukan Amerika Serikat sebagai upaya kerja sama dengan Iran. Kebijakan JCPOA juga merupakan pilihan yang sesuai dalam mencapai tujuan Amerika Serikat, dikarenakan kesepakatan ini menyorot langsung pada isu program nuklir Iran dibandingkan kebijakan sanksi ekonomi dan langkah militer.

Pada bab III menjelaskan tentang tahap *Consequences*, Obama menentukan konsekuensi yang relevan dilihat dari aspek *benefits* dan *costs* sesuai dengan tujuan negara. Dibandingkan kebijakan sanksi ekonomi dan langkah militer yang dijelaskan pada bab ini, JCPOA lebih banyak memiliki *benefits* yang sesuai dengan tujuan Amerika Serikat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek keamanan, ekonomi, politik dan pengetahuan teknologi seperti yang telah dijelaskan pada bab ini. Meskipun begitu, JCPOA juga mempunyai beberapa *costs* yang telah dijelaskan bab ini juga.

Pada tahap yang terakhir yaitu *Choice*, Obama memilih salah satu dari alternatif kebijakan yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan dari pembuat kebijakan tersebut. Terkait dengan hal itu, maka *Choice* yang dihasilkan dari isu program nuklir Iran pada masa Barack Obama adalah JCPOA. Oleh karena itu, JCPOA adalah kebijakan yang paling tepat bagi Amerika Serikat terkait program nuklir Iran karena *benefits* yang didapatkan dari JCPOA ini lebih banyak dibandingkan *costs* yang harus dibayarkan Amerika Serikat dan JCPOA juga dinilai sesuai dengan *goals and objectives* Amerika Serikat pada kasus ini.

## **4.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi terkait penelitian ini, sehingga akan memperkaya penelitian-penelitian selanjutnya terkait topik ini. Penelitian ini belum membahas mengenai kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump terkait keputusannya untuk mengakhiri kesepakatan JCPOA. Akan menarik jika penelitian selanjutnya membahas berdasarkan sudut pandang Presiden Donald J. Trump tersebut. Selain itu, lebih menarik lagi jika menganalisis perbandingan kebijakan Presiden Barack Obama dan Donald Trump mengenai isu program nuklir Iran. Hal ini dapat dilihat dari siapa atau apa saja yang mempengaruhinya sehingga kebijakan dari masing-masing Presiden tersebut dipilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administration, U. E. (2013, April 26). *US Energy Information Administration*.  
Dipetik September 21, 2018, dari US Energy Information Administration:  
<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=11011>
- Albright, J. S. (2006). Iran's NPT Violations - Numerous and Possibly On-Going?  
*The Institute for Science and International Security*, 1-2.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis*.  
Boston: Little, Brown and Company.
- Baidya, S. (2010). Probing Smart Power Paradigm in US-Iran Relations. Dalam  
M. S. Kidwai, *US Policy Towards the Muslim World: Focus on Post 9/11  
Period* (hal. 179-180). Lanham: University Press of America.
- Chubin, S. (2006). *Iran's Nuclear Ambitions*. Washington: Carnegie Endowment  
for International Peace.
- Chubin, S. (2012). Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated. *Gulf  
Research Center*, 14.
- Council, S. (2006, July 31). *United Nations*. Dipetik January 20, 2018, dari United  
Nations Web site: <https://www.un.org/press/en/2006/sc8792.doc.htm>
- Crane, K. (2009). *Imported Oil and US National Security*. Santa Monica: RAND  
Corporation.
- Davenport, K. (2016, May 31). *Arms Control Association*. Dipetik January 26,  
2019, dari Arms Control:  
[https://www.armscontrol.org/ACT/2016\\_06/News-Briefs/U.S.-Purchases-  
Iranian-Heavy-Water](https://www.armscontrol.org/ACT/2016_06/News-Briefs/U.S.-Purchases-Iranian-Heavy-Water)

- Edwards, J. (2015, August 6). *Reuters*. Dipetik January 26, 2019, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-obama/obama-defends-iran-nuclear-deal-as-diplomacy-winning-over-war-idUSKCN0QA1MG20150806>
- Egan, M. (2018, June 7). *CNN*. Dipetik January 26, 2019, dari CNN: <https://money.cnn.com/2018/06/07/news/companies/iran-sanctions-general-electric-trump/index.html>
- El-Khawas, M. (2011). Obama's Engagement Strategy with Iran: Limited Results. *Mediterranean Quarterly*, 1.
- Entessar, N. (2018). *Iran Nuclear Accord and the Remaking of the Middle East*. London: Rowman & Littlefield.
- Erdbrink, T. (2016, January 16). *The New York Times*. Dipetik October 20, 2018, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2016/01/17/world/middleeast/iran-releases-washington-post-reporter-jason-rezaian.html>
- Esfandiary, D. (2016). The Impact of the Iran Deal on International Politics in the Middle East. *The Euro Mediterranean Partnership*, 232.
- Fayazmanesh, S. (2013). *Containing Iran: Obama's Policy of "Tough Diplomacy"*. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.
- Fitzpatrick, M. (2010). Iran : The Fragile Promise of the Fuel- Swap Plan. *Survival : Global Politics and Strategy* , 68-69.
- Gladstone, R. (2012, January 18). *New York Times*. Dipetik September 21, 2018, dari The New York Times:

<https://www.nytimes.com/2012/01/19/world/middleeast/irans-rial-falls-to-new-low-against-dollar.html>

Habibi, N. (2018). The Iranian Economy Two Years After The Nuclear Agreement. *Middle East Brief*, 2-4.

Hargreaves, S. (2012, March 31). *CNN Money*. Dipetik October 20, 2018, dari CNN: <https://money.cnn.com/2012/03/30/news/international/Iran-sanctions/index.htm>

Indyk, M. S. (2012). *Bending History: Barack Obama's Foreign Policy*. Washington: The Brookings Institution.

Izadi, F. (2007). A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorials : The Case of Iran's Nuclear Program. *Communication Inquiry*, 145.

JCPOA. (2015, July 14). *Washington Post*. Dipetik January 26, 2019, dari Washington Post: <https://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-nuclear-deal/1651/>

Katzman, K. (2015). Iran Nuclear Agreement. *Congressional Research Service*, 7-9.

Katzman, K. (2017). Iran Nuclear Agreement. *Congressional Research Service*, 5-6.

Kaye, D. D. (2016). Israel's Iran Policies After the Nuclear Deal. *RAND Center for Middle East Public Policy*, 2-3.

Khajehpour, B. (2013). Iran's Economic Suffering. *Aspen Institute Italia*, 26-27.



- Kroenig, M. (2012). Time To Attack Iran : Why a Strikes is the Least Bad Option. *Foreign Affairs* , 79-80.
- Kryzanek, M. (2011). *Debates, Differences and Divisions: The 25 Issues That Shape American Politics*. New York: Routledge.
- Lappin, Y. (2015, April 5). *The Jerusalem Post*. Dipetik September 22, 2018, dari The Jerusalem Post: <https://www.jpost.com/Israel-News/Key-weaknesses-of-the-Iran-nuclear-agreement-396181>
- Mahapatra, C. (2016). US-Iran Nuclear Deal : Cohorts and Challenger. *Contemporary Review of the Middle East* , 38.
- McGlinchey, S. a. (2012). Iran's Nuclear Ambitions Under The Shah and Ayatollahs. *Small Wars Journal*.
- Menon, K. (2013). Charm Offensive Or 'Axis Of Evil'? An Analysis Of The Iranian Nuclear Program And American Responses. *A Journal of Transdisciplinary Writing and Research*, 3-5.
- Menon, K. (2013). Charm Offensive Or 'Axis Of Evil'? An Analysis Of The Iranian Nuclear Program And American Responses. *A Journal of Transdisciplinary Writing and Research*, 3-5.
- Mogherini, F. (2017, January 17). *The Guardian*. Dipetik September 22, 2018, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/17/iran-nuclear-deal>

Morello, C. (2016, January 16). *The Washington Post*. Dipetik January 20, 2018, dari The Washington Post:

[https://www.washingtonpost.com/world/national-security/world-leaders-gathered-in-anticipation-of-iran-sanctions-being-lifted/2016/01/16/72b8295e-babf-11e5-99f3-184bc379b12d\\_story.html?utm\\_term=.9366c7fd83db](https://www.washingtonpost.com/world/national-security/world-leaders-gathered-in-anticipation-of-iran-sanctions-being-lifted/2016/01/16/72b8295e-babf-11e5-99f3-184bc379b12d_story.html?utm_term=.9366c7fd83db)

Mousavian, S. H. (2017). Assessing US - Iran Nuclear Engagement. *The Washington Quarterly*, 72-74.

Mousavian, S. H. (2018). Building On The Iran Nuclear Deal For International Peace And Security. *Journal For Peace And Nuclear Disarmament*, 14-17.

Mueller, K. P. (2017). U.S. Strategic Interests in the Middle East and Implications for the Army. *RAND Corporation*, 2.

Norell, M. (2015). A Really Bad Deal : The Iran Nuclear Deal and Its Implications. *European View*, 290-291.

Obama, T. W. (2015, July 14). *The White House President Barack Obama*. Dipetik January 23, 2019, dari Obama White House: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/07/14/statement-president-iran>

Obama, T. W. (2016, January 17). *The White House President Barack Obama*. Dipetik September 22, 2018, dari The White House President Barack Obama: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/01/17/statement-president-iran>

Özcan, N. A. (2009). Iran's Nuclear Program and The Future of US-Iranian Relations. *Middle East Policy Council*, 128-129.

- Özdamar, N. A. (2009). Iran's Nuclear Program and The Future of US - Iranian Relations. *Middle East Policy*, 121-124.
- Parsi, T. (2017). *Losing an Enemy: Obama, Iran and The Triumph of the Diplomacy*. United States of America: Westchester Publishing.
- Pasha, A. K. (2016). Saudi Arabia and the Iranian Nuclear Deal. *Contemporary Review of the Middle East*, 7-8.
- Pavgi, K. (2011, November 17). *Foreign Policy*. Dipetik January 5, 2019, dari Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2011/11/17/barack-obamas-foreign-policy/>
- Reardon, R. J. (2012). *Containing Iran: Strategies for Addressing the Iranian Nuclear Challenge*. Santa Monica: RAND.
- Rieffer-Flanagan, B. A. (2018). Obama's Legacy: The View from Persia. Dalam M. Maass, *The World Views of The Obama Era : From Hope to Disillusionment* (hal. 193-194). London: Palgrave Macmillan.
- Samore, G. (2015). *Sanctions Against Iran : A Guide To Targets, Terms and Timetables*. Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs.
- Sanger, D. E. (2015, August 23). *The New York Times*. Dipetik September 22, 2018, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/08/24/world/middleeast/in-pushing-for-the-iran-nuclear-deal-obamas-rationale-shows-flaws.html>
- Saunders, H. H. (1978). US Interests and Goals in the Middle East. *Middle East Research and Information Project*, 13-14.

Sharp, T. (2009). US Foreign Policy Toward Iran in the Obama Era. *ISPI Policy Brief*, 5-6.

Sherman, W. (2018, August 13). *Foreign Affairs*. Dipetik January 5, 2019, dari Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-08-13/how-we-got-iran-deal>

Sherman, W. (2018, August 13). *Foreign Affairs*. Dipetik December 2, 2018, dari Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-08-13/how-we-got-iran-deal>

Simpson, K. (2016). *U.S. Nuclear Diplomacy with Iran: From the War on Terror to the Obama Administration*. London: Rowman & Littlefield.

State, U. D. (2015). *US Department of State*. Dipetik January 20, 2018, dari US Department of State : Diplomacy in Action: <https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/>

Steinhauer, J. (2015, September 10). *The New York Times*. Dipetik November 20, 2018, dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/09/11/us/politics/iran-nuclear-deal-senate.html>

Sterio, M. (2016). President Obama's Legacy : The Iran Nuclear Agreement. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 70-71.

Sterio, M. (2016). President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement? *Case Western Reserve Journal of International Law*, 81-82.

- Stone, R. (2015, July 14). *Science Magazine* . Dipetik January 26, 2019, dari American Association for the Advancement of Science: <https://www.sciencemag.org/news/2015/07/iran-nuclear-deal-opens-door-scientific-collaborations>
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Tabatabai, A. (2017). Preserving the Iran Nuclear Deal. *Policy Analysis CATO Institute*, 6-7.
- Taleblu, B. B. (2018). *Iranian Ballistic Misslie Tests Since the Nuclear Deal - 2.0*. Washington: Foundation For Defense of Democracies .
- Teitelbaum, J. (2008). What Iranian Leaders Really Says About Doing Away With Israel. *Jerusalem Center for Public Affairs*, 13.
- Thompson, R. (2011). The Effectiveness of the Fourth Round of Sanctions Against Iran. *Stanford Journal of International Relations*, 7-8.
- Viney, S. (2015, August 4). *Radio Australia*. Dipetik October 3, 2017, dari Radio Australia: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2015-08-04/lima-ancaman-nuklir-yang-dihadapi-dunia-saat-ini/1477300>
- Vishwanathan, A. (2016). Iranian Nuclear Agreement : Understanding the Nonproliferation Paradigm. *Contemporary Review of the Middle East*, 3-4.
- Vuković, T. S. (2015). After the Iran Nuclear Deal: Europe's Pain and Gain. *The Washington Quarterly*, 88-90.
- Warren, A. (2014). *The Obama Administration's Nuclear Weapon Strategy : The Promises of Prague*. New York: Routledge.

- Whitehouse, O. (2015, August 5). *The White House President Barack Obama*. Dipetik January 5, 2019, dari The White House: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/05/remarks-president-iran-nuclear-deal>
- Wibowo, W. (2011). *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Buku Kompas.
- Worland, J. (2018, May 9). *Time*. Dipetik December 2, 2018, dari Time: <http://time.com/5269906/iran-nuclear-deal-donald-trump-oil/>
- Wright, R. (2008, March 21). *Washington Post*. Dipetik October 3, 2017, dari Washington Post: <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/20/AR2008032002284.html>
- Young, J. (2016, February 16). *Reuters*. Dipetik January 26, 2019, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-ge-iran/ge-explores-oil-and-gas-business-in-iran-with-top-executive-visit-idUSKCN0VP0AO>
- Zanotti, J. (2012). Israel: Possible Military Strike Against Iran's Nuclear Facilities. *Congressional Research Service*, 1-2.